HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
26 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

KAMIS, 12 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

ACEH

The Pade Hotel Dukung Pelantikan SMSI Aceh Besar, Media Berperan Promosikan Daerah

Oleh Redaksi · 12 Nov, 20.01 WIB



BANDA ACEH, ACEH BESAR – Manajemen The Pade Hotel Aceh Besar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029 yang dirangkai dengan kegiatan SMSI Aceh Besar Awards 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di The Pade Hotel, Aceh Besar.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh General Manager (GM) The Pade Hotel Aceh Besar, Reckyanto Mella, Kamis (12/11/2026). Ia menyambut positif kehadiran SMSI di Aceh Besar dan berharap organisasi perusahaan media siber tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam mempromosikan potensi daerah.

Menurut Reckyanto, media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif suatu daerah melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan konstruktif. Publikasi yang luas mengenai potensi wisata, budaya, kuliner, hingga fasilitas perhotelan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Aceh Besar bagi masyarakat luar daerah.

"Peran media siber sangat penting dalam menyebarluaskan informasi positif tentang Aceh Besar. Kami berharap melalui pemberitaan dan publikasi yang baik, semakin banyak masyarakat dari luar daerah tertarik untuk datang dan berkunjung ke Aceh," ujarnya.

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa TK? Sosok Misterius yang Disebut Kapolri Terlibat Penyadapan Presiden



BANDA ACEH - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru berinisial TK.Namanya mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus LSP Buka Tabir Gelap Era Jokowi



BANDA ACEH -Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP) mulai membuka tabir berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini ramai menjadi desas-desus di kalangan elite Politik.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 19
EDUKASI 21
Aneka Berita 23

INTERNASIONAL

Ukraina Tangkap WNI asal Jawa jadi Tawanan Perang, Ini Wajahnya Lihat!



BANDA ACEH - Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama asal Indonesia.

Penangkapan itu, menurut pemerintah Ukraina, terjadi di tengah peningkatan perekrutan WNI oleh Rusia untuk dijadikan tentara di garis depan pertempuran.

Pria berusia 49 tahun yang berasal dari Jawa Timur itu dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk …

Selengkapnya di halaman 23 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Muzakir Manaf Mantan Panglima GAM Calon Pengganti Gibran?



Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, yang didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (4/11/2026).

BANDA ACEH – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) memicu spekulasi luas soal figur pengganti. Salah satu nama yang belakangan dibicarakan sebagian pihak sebagai opsi potensial adalah Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal sebagai Mualem, Gubernur Aceh yang menjabat sejak 12 Februari …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

41 BERITA

NASIONAL

Muzakir Manaf Mantan Panglima GAM Calon Pengganti Gibran?

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.41 WIB



Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, yang didampingi Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

BANDA ACEH – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) memicu spekulasi luas soal figur pengganti. Salah satu nama yang belakangan dibicarakan sebagian pihak sebagai opsi potensial adalah Muzakir Manaf, atau yang lebih dikenal sebagai Mualem, Gubernur Aceh yang menjabat sejak 12 Februari 2025.Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, jabatan Wapres kosong sejak hari itu, dan MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi kekosongan melalui pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden diberi waktu hingga 14 hari untuk mengajukan dua nama beserta kelengkapan persyaratan.

Hingga saat ini, nama-nama yang paling sering muncul dalam analisis Politik dan pemberitaan meliputi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Anies Baswedan, serta sejumlah kader Gerindra. Muzakir Manaf belum menjadi nama utama dalam daftar tersebut, namun latar belakang dan kedekatannya dengan Prabowo membuat sebagian pengamat menilai ia layak diperhitungkan sebagai opsi pendukung atau penyeimbang.

Muzakir Manaf lahir 3 April 1964 di Seunuddon, Aceh Utara. Ia adalah mantan Panglima tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Abdullah Syafi'i, Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007, dan pernah menjabat Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017. Pada Pilpres 2024, ia ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Gibran di Aceh dan sebelumnya juga memimpin pemenangan Prabowo-Sandi pada 2019 yang meraih suara dominan di Aceh.

Pada Pilkada Aceh 2024, Muzakir berpasangan dengan Fadhlullah (kader Gerindra) dan memenangkan pemilihan dengan sekitar 53 persen suara, lalu dilantik sebagai Gubernur Aceh. Ia juga menjabat Waliyul 'Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Baru-baru ini, pada 4 November 2026, Muzakir bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara untuk membahas isu strategis Aceh, termasuk keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), kepastian hukum Bendera Aceh, status tanah wakaf Blang Padang, serta usulan dana abadi bagi mantan kombatan GAM. Pertemuan itu mendapat respons positif dari Prabowo.

Para pendukung potensial menilai pengalaman Muzakir dalam mengelola daerah pascakonflik, basis dukungan kuat di Aceh, serta loyalitas politik terhadap Prabowo menjadi keunggulan. Ia juga memiliki pengalaman militer dan politik yang panjang, yang bisa melengkapi sisi kepemimpinan nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Siapa TK? Sosok Misterius yang Disebut Kapolri Terlibat Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.25 WIB



BANDA ACEH - Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru berinisial TK.Namanya mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance.

Sosok TK disebut dalam pemaparan Suyudi saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis, (12/11/26). Namun, Kapolri belum mengungkap identitas TK maupun siapa pihak yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.

Dalam perkara ini, Ahrie diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga melaporkan hasilnya kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada (7/10/25) hingga (1/10/ 26).

"Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," kata Suyudi.

Dalam pengungkapan di hadapan anggota DPR, Suyudi juga membeberkan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," katanya.

Tak hanya itu, Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

"Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX," ujarnya.

Dugaan aktivitas tersebut kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada (30/10/26). Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada (1/11/26) dan ditahan sehari kemudian.

Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Santer Dikabarkan Mundur, Gibran Tinggalkan Istana Wapres!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.35 WIB

BANDA ACEH - Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden di tengah penantian awak media yang sejak pagi menunggu kejelasan terkait kabar pengunduran dirinya. Momen tersebut luput dari pantauan puluhan jurnalis yang saat itu tengah beristirahat di kantin.Situasi ini terjadi setelah sebelumnya pihak Istana Wakil Presiden menyampaikan bahwa Gibran dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu, 11 November 2026. Namun, agenda tersebut mendadak dibatalkan tanpa penjelasan mengenai alasan pembatalannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran masih menjalankan aktivitasnya di Istana Wakil Presiden pada Rabu siang. Ia disebut sempat menerima sejumlah tamu internal, meskipun aktivitas tersebut tidak terlihat langsung oleh wartawan karena adanya pembatasan akses menuju area dalam istana.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Gibran disebut telah meninggalkan kantornya. Namun, pergerakannya saat keluar dari kawasan Istana Wapres tidak terpantau oleh awak media.

Menjelang petang, beredar informasi bahwa Gibran akan menyampaikan pernyataan kepada media melalui konferensi pers. Kabar tersebut membuat para jurnalis kembali bersiaga di sekitar area parkir Istana Wakil Presiden.

Hal tersebut terjadi tepat setelah santernya kabar bahwa Gibran sudah menandatangani surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo.

Sejak sekitar pukul 18.00 WIB, puluhan wartawan mulai menyiapkan kamera dan peralatan peliputan untuk menunggu kehadiran Gibran. Sebagian pegawai Sekretariat Wakil Presiden juga terlihat berkumpul di area tersebut.

Namun, setelah menunggu lebih dari 30 menit tanpa adanya tanda-tanda konferensi pers, para jurnalis akhirnya menjauh dari area parkir dan beristirahat di kantin setelah diminta petugas untuk menepi.

Justru pada saat itulah Gibran terlihat meninggalkan Istana Wakil Presiden sekitar pukul 19.00 WIB.

Momen tersebut membuat awak media yang telah menunggu sejak pagi tidak mendapatkan kesempatan untuk meminta keterangan langsung dari Gibran terkait kabar pengunduran dirinya.

Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan

Kabar pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian setelah Budi Arie membenarkan informasi tersebut. Gibran disebut telah menyampaikan keputusan mundur sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo pada Rabu sore.

Menurut informasi yang beredar, Gibran semula direncanakan menyampaikan pengumuman terkait keputusannya pada Rabu malam. Namun, agenda tersebut urung terlaksana.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Diisukan Jadi Wapres Gantikan Gibran, Ini Kata Maruarar Sirait

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.52 WIB

BANDA ACEH – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membantah isu yang menyebut dirinya bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Maruarar menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Hahaha, itu mana mungkin ya. Tahu diri. Eh, saya tuh apa sih gitu ya?" ujar Maruarar kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa kabar mengenai dirinya yang akan menjadi Wapres merupakan informasi bohong.

Maruarar mengatakan saat ini dirinya memilih untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai Menteri PKP.

"Nggak ada itu (isu menjadi Wapres), bohong gitu ya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kasus LSP Buka Tabir Gelap Era Jokowi

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.15 WIB



BANDA ACEH -Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan komplotan Listyo Sigit Prabowo (LSP) mulai membuka tabir berbagai praktik penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini ramai menjadi desas-desus di kalangan elite Politik.

Dino menyebut, pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), banyak beredar cerita mengenai dugaan konspirasi, konflik kepentingan, kolusi antara petinggi dan oligarki, hingga penyalahgunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik.

Menurutnya, berbagai dugaan tersebut selama ini hanya menjadi perbincangan dan spekulasi di kalangan elite politik. Namun, tidak banyak pihak yang berani mengungkapkannya secara terbuka karena takut atau memilih mencari aman.

"Di periode ke-2 era Pemerintahan Jokowi, kita banyak mendengar desas-desus mengenai maraknya praktik konspirasi, abuse of power, konflik kepentingan, kolusi petinggi dengan oligarki atau mafia tertentu, blackmail sebagai modus operandi politik, pelanggaran hukum, weaponization hukum," kata Dino lewat akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.

Ia juga menyinggung dugaan penggalangan dana secara masif dengan cara tidak wajar bahkan ilegal, kriminalisasi lawan politik, mobilisasi buzzer dalam skala besar, serta manipulasi institusi Polri.

Selain itu, Dino menyoroti dugaan penyalahgunaan KPK, kejaksaan, dan institusi pajak sebagai instrumen untuk menekan lawan politik.

"Elite politik tidak pernah habis cerita, gosip dan spekulasi mengenai hal-hal ini, namun semuanya tiarap karena takut atau mau cari aman," ujarnya.

Dino menilai kasus penyadapan yang menyeret komplotan LSP kini mulai membuka berbagai dugaan tersebut ke ruang publik.

"Kasus penyadapan komplotan LSP mulai membuka tabir yang sebelumnya tertutup rapih bahwa sebagian (besar) dari desas-desus ternyata benar adanya, dan bahkan lebih parah dari yang diperkirakan," tegasnya.

Lebih jauh, ia berharap terungkapnya kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pemerintahan yang dinilainya telah banyak mengalami kerusakan.

Dino juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, langkah Kapolri menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Mudah-mudahan tragedi ini bisa menjadi awal yang baik bagi Presiden Prabowo untuk memulai berbagai upaya korektif terhadap sistem yang sudah banyak dirusak. Salut terhadap Kapolri Suyudi yang mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Polri. Semoga bersih-bersih ini bisa diikuti yang lain," pungkasnya.

NASIONAL

Pesan Terakhir Gibran usai Mundur: Mohon Maaf untuk Setiap Hati yang Terluka

Oleh Redaksi · 12 Nov, 21.04 WIB



BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada seluruh masyarakat Indonesia setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

Gibran Rakabuming Raka mengakui masih ada harapan rakyat yang belum terwujud hingga berbagai persoalan yang belum terselesaikan selama dirinya mengemban amanah tersebut. Ungkapan ini disampaikan Gibran Rakabuming Raka melalui pernyataan yang diunggah di media sosial.

Dalam pesan perpisahannya, Gibran secara khusus meminta maaf atas segala keterbatasan selama menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di Indonesia.

"Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf," kata Gibran.

Dia melanjutkan, "Untuk setiap harapan yang belum bisa terwujud, untuk setiap masalah yang belum terselesaikan, untuk setiap hati yang mungkin terluka karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf."

Sebelumnya, Gibran mengumumkan keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Dia menyebut keputusan tersebut telah melalui pertimbangan panjang dan matang.

Menurut Gibran, jabatan hanyalah titipan sementara. Dia menilai kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun keinginan mempertahankan posisi.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para relawan yang telah bekerja bersama selama menjalankan pemerintahan.

Secara khusus, dia turut menitipkan pesan kepada generasi muda Indonesia agar tidak takut bermimpi besar dan terus berkontribusi bagi bangsa.

Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan resmi usai mengundurkan diri dari jabatan Wapres (Dok. Setwapres)

Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan resmi usai mengundurkan diri dari jabatan Wapres (Dok. Setwapres)

"Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia," tuturnya.

Gibran menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa berakhirnya satu bab perjalanan dalam hidupnya tidak akan mengakhiri kecintaannya kepada Indonesia.

"Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia, apa pun kondisinya," katanya

NASIONAL

Beda Nasib Wapres yang Mundur dan Dimakzulkan, Mulai dari Proses hingga Hak Pensiun

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.48 WIB

BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut.

Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

Perkembangan ini terjadi ketika tekanan Politik terhadap posisi Gibran semakin menguat.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dirinya.

Situasi tersebut membuat publik menyoroti dua mekanisme yang sama-sama dapat mengakhiri jabatan seorang Wakil Presiden sebelum masa tugasnya selesai, yakni mengundurkan diri dan dimakzulkan.

Meski memiliki akibat berupa berakhirnya masa jabatan, keduanya tidak bisa disamakan.

Pengunduran diri berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kemauan sendiri.

Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.

Pasal 8 ayat (1) mengatur kondisi ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.

Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah ditetapkan dan menimbulkan kekosongan jabatan secara resmi, proses selanjutnya adalah pengisian posisi Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Artinya, pengunduran diri tidak harus diawali dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Mahkamah Konstitusi. Jalurnya berbeda dengan proses pemakzulan.

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Sampaikan Surat Pengunduran Diri, Besok Diserahkan ke DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malam ini (11/11/2016) menemui Presiden Prabowo.

Informasi yang didapat monitorindonesia.com, Wakil Presiden Gibran akan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Malam ini ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran. Agendanya penyerahan surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres,” kata sumber monitorindonesia.com, Rabu malam (11/11/2026).

Besok (Kamis, 12/11/2026), surat pengunduran diri Gibran akan disampaikan ke DPR RI.

“Rencananya, surat pengunduran diri akan diserahkan ke DPR RI,” ujar sumber itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PK Gibran Tak Halangi Sidang Istimewa MPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 20.10 WIB

BANDA ACEH -Rencana Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan Gibran Rakabuming Raka atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026, dinilai tidak dapat menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

Menurut Teguh, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang tidak terlibat dalam perkara tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum PK.

"Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742," ujar Teguh dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.

Selain persoalan kedudukan hukum, Teguh menjelaskan bahwa pengajuan PK pada prinsipnya tidak menunda ataupun menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut dia, rencana PK tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi MPR menggelar Sidang Istimewa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bandingkan Surat Pengunduran Diri Gibran dengan Soeharto, Yusril: MPR Tidak Perlu Adakan Sidang Persetujuan

Oleh Van · 12 Nov, 18.14 WIB



Seorang profesional memberikan penjelasan dalam suasana kantor yang elegan.

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden mirip dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran memiliki kemiripan dengan surat pengunduran Soeharto, yakni sama-sama menyatakan berhenti.

Oleh karena itu, kata Yusril tidak perlu lagi bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mengadakan sidang paripurna untuk membahas persetujuan mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ucap Yusril kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2026.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dengan menggunakan kata ‘berhenti’ berarti pilihan untuk mundur adalah kemauan sendiri.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” jelasnya.

Mekanisme Penggantian Gibran Berbeda dengan Soeharto

Dalam kesempatan yang sama, Yusril juga menjelaskan bahwa proses penggantian Gibran tetap akan berbeda dengan Soeharto.

“Presiden berhenti, otomatis digantikan oleh Wakil Presiden. Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden, kan enggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” sambung Yusril.

“Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU,” terangnya.

Penyerahan Surat Pengunduran Diri Gibran ke MPR

Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026 dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit.

MPR kini memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan pemilihan wakil presiden pengganti setelah menerima surat dari Presiden mengenai pengajuan dua calon.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.(*)

NASIONAL

LPI Sebut Dasco Sosok Tepat Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.48 WIB



BANDA ACEH - Wacana mengenai sosok yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden kembali menjadi perhatian di tengah perkembangan Politik nasional.Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menyampaikan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi figur yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam wacana tersebut.

Direktur Eksekutif Nasional (DEN) LPI, Akhrom Saleh menilai, Sufmi Dasco memiliki kapasitas politik dan karakter kenegarawanan yang dibutuhkan untuk membantu Presiden Prabowo menghadapi berbagai tantangan pemerintahan.

"Pengalaman serta kemampuan komunikasi politik Dasco diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus menjaga situasi politik nasional tetap kondusif," kata Akhrom dalam Konferensi pers di Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Ia juga menilai stabilitas politik mempunyai hubungan erat dengan kondisi perekonomian. Situasi politik yang kondusif dinilai dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

"Tentunya kalau stabilitas politik kita tenang, ekonomi juga berjalan baik, investor juga bisa tenang," tandasnya.

Dia menekankan, Dasco merupakan sosok yang pas untuk mendampingin Prabowo dalam memimpin pemerintahan ini.

"Intinya kami sampai saat ini hanya beliau (Dasco), untuk yang lain kami belum melihat," tandasnya.

Dia menyebutkan, saat ini stabilitas politik Indonesia tidak baik. Alhasil, sambungnya, hal tersebut juga berdampak pada perekonomian bangsa.

"Stabilitas politik kita dalam dua tahun ini gonjang ganjing, kita tau sama-sama seperti apa jadinya, ekonomi juga jadi berpengaruh, kita harapkan dengan stabilitas politik yang mana harapannya Bang Sufmi Dasco bisa membantu presiden ke depan, stabilitas politik jadi baik, masih ada waktu tiga tahun," tutur Akhrom.

Lebih lanjut, dia berharap, kehadiran figur dengan pengalaman politik yang kuat dapat membantu Prabowo menjaga kesinambungan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Sisa waktu tiga tahun pemerintahan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat stabilitas politik, menjaga kepercayaan investor, serta memastikan agenda pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal," paparnya.

NASIONAL

Heboh Gibran Mau Mundur dari Wapres, Netizen Sentil Prabowo: Tolak! Makzulkan di DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.58 WIB

BANDA ACEH -Kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari kursi Wapres memicu komentar netizen. Prabowo diminta menolak dan mendorong pemakzulan di DPR.

Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI semakin ramai diperbincangkan.

Di tengah polemik yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut, muncul desakan dari warganet agar Presiden Prabowo Subianto tidak begitu saja menerima keinginan mundur sang wakil presiden.

Ia justru berharap Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran dan mendorong proses pemakzulan melalui DPR.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai menyentil posisi Politik Gibran di tengah polemik yang sedang berkembang.

“Semoga Pak Prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur,” tulis akun tersebut dalam unggahannya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Komentar itu memperlihatkan adanya suara kritis di media sosial terhadap kemungkinan Gibran mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri.

Bagi warganet tersebut, mundur secara sukarela dianggap bukan pilihan yang seharusnya begitu saja diterima.

Polemik ini bermula setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap adanya pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut membahas sejumlah persoalan politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Keinginan itu muncul di tengah dinamika yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut sontak memicu perhatian publik.

Pasalnya, jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis dalam pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi politik dan konstitusional.

Meski kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak keinginan tersebut.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Artinya, belum ada keterangan resmi bahwa Prabowo menerima ataupun menolak permintaan pengunduran diri sang wakil presiden.

Selain membicarakan persoalan jabatan, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Suasana Istana Wapres Usai Gibran Dikabarkan Mundur, ASN Saling Berpelukan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.43 WIB

BANDA ACEH - Kompleks Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dipadati awak media pada Rabu (11/11/2026) malam. Wartawan berbondong-bondong mendatangi Istana Wakil Presiden, tempat Gibran Rakabuming Raka berkantor, menyusul kabar mengenai niat pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 18.20 WIB, sejumlah kamera televisi telah berjajar di jalur masuk kendaraan menuju Istana Wapres. Para jurnalis bersiaga untuk menunggu kemungkinan pernyataan dari Gibran.

Namun, setelah awak media menunggu, pihak Wakil Presiden menyampaikan bahwa tidak akan ada pernyataan dari Gibran pada hari itu.

Wartawan kemudian sempat diarahkan menuju Kantin Mersela untuk menyantap kudapan yang telah disiapkan. Di tengah pergeseran awak media tersebut, suasana berbeda justru terlihat di lingkungan kantor Setwapres.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Setwapres tampak berkumpul di pelataran depan dan area parkir kantor. Mereka terlihat saling berpelukan, bersalaman, serta menepuk bahu satu sama lain.

Beberapa staf Gibran dan sekretaris pribadinya (sespri) juga terlihat berada di area tersebut. Momen itu berlangsung ketika awak media masih berada di kompleks Setwapres untuk menunggu perkembangan informasi mengenai kabar pengunduran diri Wakil Presiden.

Meski demikian, akses wartawan untuk mengambil gambar atau mengabadikan momen tersebut dibatasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril: Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dicabut, Tak Lagi Punya Kekuatan Hukum

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.37 WIB



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.

Yusril menyebut, setelah surat keterangan itu dicabut, tidak ada lagi landasan hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Dia menjelaskan, pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditandatangani dan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menekankan, pencabutan dokumen tersebut tidak bisa dipandang semata-mata sebagai keputusan administratif. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk pemenuhan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Kewajiban tersebut, lanjut dia, juga memiliki landasan dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Aturan itu mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan putusan pengadilan sesuai amar yang telah ditetapkan.

Yusril berpandangan, pencabutan surat keterangan tersebut membuat tidak tersedia lagi langkah hukum untuk mempertahankan keberlakuan dokumen melalui perkara yang telah diputus pengadilan.

Dia juga menjelaskan, dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang bertindak sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," kata Yusril.

Yusril menilai putusan kasasi MA tersebut mengubah kedudukan hukum persoalan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ajudan Jokowi Beberkan Kesaksian soal Ijazah hingga Sikap Jokowi Hadapi Tuduhan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.41 WIB

BANDA ACEH — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ternyata telah lama menghadapi tudingan ijazah palsu, bahkan sejak masih menjabat sebagai kepala negara. Namun, Jokowi baru memutuskan menempuh jalur hukum setelah purna tugas karena tuduhan tersebut masih terus berlanjut.

Hal itu diungkapkan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Syarif menjelaskan bahwa Jokowi sebenarnya sudah lama merasakan serangan dan tuduhan terkait keaslian ijazahnya. Meski demikian, saat itu Jokowi belum memiliki niat untuk melaporkannya ke kepolisian.

"Mungkin sedikit kami menjelaskan, Yang Mulia. Sebenarnya ini sudah lama yang dirasakan oleh beliau, akan tetapi beliau belum ada niatan pada saat waktu itu ya, kami sudah lupa beberapa tahun untuk membuat laporan polisi," ujar Syarif di ruang sidang.

Menurut Syarif, tudingan tersebut ternyata tidak berhenti setelah Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Serangan dan tuduhan serupa masih terus dialami sehingga akhirnya Jokowi memilih mengambil langkah hukum.

"Nah, hingga akhirnya beliau sudah purna, beliau merasakan hal yang sama, walaupun beliau sudah purna akan tetapi masih ada serangan atau tuduhan terkait mengenai ijazah palsu ini," katanya.

Syarif menegaskan, keputusan Jokowi melaporkan persoalan tersebut ke polisi bertujuan memperoleh kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan.

Dalam persidangan itu, Syarif juga mengungkap reaksi Jokowi ketika diperlihatkan sejumlah unggahan dan video yang memuat tudingan terkait ijazah sarjana miliknya. Konten tersebut antara lain mempersoalkan skripsi hingga lembar pengesahan ijazah.

Dia mengaku beberapa kali melihat perubahan ekspresi Jokowi ketika menerima informasi mengenai tuduhan tersebut. Menurutnya, Jokowi berusaha menahan emosi setiap kali diperlihatkan konten yang menyerang keaslian dokumen pendidikannya.

"Sepengetahuan kami, kami tahu beliau sudah sangat bersabar, Yang Mulia. Ketika kami menunjukkan video ataupun postingan terkait adanya tuduhan, kami melihat mimik beliau berubah seperti menahan emosi," ucap Syarif.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rumah Listyo Sigit Digeledah, Polri Sita Log Penyadapan hingga 15 Ponsel

Oleh Redaksi · 12 Nov, 12.25 WIB



BANDA ACEH — Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik tidak hanya menangkap dan menahan para tersangka, tetapi juga menggeledah rumah Listyo serta menyita sejumlah barang bukti elektronik, termasuk log data penyadapan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, barang bukti yang disita terdiri dari 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

"Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan," ujar Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penyitaan log data penyadapan menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan perkara tersebut. Sebab, barang bukti itu dapat menjadi bagian dari proses pembuktian mengenai aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan para tersangka.

Suyudi juga mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, target operasi diduga mencakup sejumlah pejabat negara, lembaga pemerintahan, hingga kelompok masyarakat.

"Berdasarkan hasil penyidikan sasaran penyidikan mencakup berbagai kalangan antara lain, Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, dan parpol, tokoh Politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," ungkapnya.

Rumah Listyo Sigit Digeledah, Empat Jenderal Jadi Tersangka

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tersebut, Suyudi turut membeberkan kronologi penanganan perkara sejak laporan polisi diterbitkan pada 31 Oktober 2026.

Penyidik terlebih dahulu memeriksa enam saksi dan empat ahli sebelum meningkatkan perkara ke tahap penyidikan pada 1 November 2026.

Setelah menyita sejumlah barang bukti, Polri menetapkan Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ahrie ditangkap dan ditahan pada 2 November, sedangkan Eko menjalani pemeriksaan pada 3 November.

Dari pemeriksaan dan pengembangan perkara, penyidik kemudian menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka. Mantan Kapolri tersebut ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026.

Sehari kemudian, penyidik menggeledah kediaman Listyo. Penggeledahan itu dilakukan bersamaan dengan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung untuk menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anggota Dilarang Keluar Jakarta Jelang Paripurna Pemakzulan Gibran, Ini Kata Pimpinan DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 20.02 WIB

BANDA ACEH -Kabar yang beredar di media sosial mengenai larangan bagi anggota DPR RI bepergian ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, direspons Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Saan menegaskan, tidak ada kebijakan khusus yang melarang anggota DPR meninggalkan Jakarta.

Menurutnya, keberadaan anggota di ibu kota berkaitan dengan agenda masa persidangan yang sedang berlangsung.

"Itu kebijakan masing-masing. Karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang," kata Saan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, selama masa sidang, anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas kedewanan, termasuk mengikuti rapat kerja dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Kantongi Bukti Awal Dugaan Makar Listyo Sigit Dkk

Oleh Redaksi · 12 Nov, 12.31 WIB



BANDA ACEH - Tim khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi polisi lainnya. Temuan ini menjadi tindak pidana baru di luar kasus akses ilegal (illegal access) yang menjerat mereka sebelumnya sebagai tersangka penyadapan.Kendati demikian, kepolisian belum menetapkan status tersangka dalam perkara makar ini.

"Hasil penyelidikan-penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," ungkap Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Asep menerangkan, para terduga pelaku tindak pidana makar tersebut meliputi Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Ia memastikan penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah pihak yang dibidik seiring berjalannya pendalaman kasus.

Pengusutan dugaan makar ini didasarkan pada Laporan Polisi (LP) yang berbeda dari kasus akses ilegal di mana keempat perwira tinggi tersebut telah berstatus tersangka.

Asep menegaskan bahwa penanganan dugaan makar saat ini masih berada dalam tahapan penyelidikan.

"Karena proses ini baru terbit laporan polisi dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya," kata Asep.

Selama proses bergulir, penyidik berkomitmen menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memedomani hak asasi manusia (HAM).

Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung terkait proses penanganan berkas perkaranya kelak. Asep turut mengimbau publik agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar liar di media sosial mengenai kasus ini.

Di sisi lain, masyarakat dipersilakan melapor ke Polri apabila memiliki informasi valid yang dapat membantu kelancaran pengungkapan perkara.

"Media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini atau berita-berita yang hoaks, semua satu sumber, yaitu kami yang sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana makar tersebut," ucap Asep.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa bukti permulaan makar tersebut didapat setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan ahli.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dapur SPPG Umbulharjo Ditemukan Lalat dan Indikasi Tikus, 162 Orang Diduga Keracunan

Oleh Van · 12 Nov, 17.04 WIB



Tenaga medis bekerja dengan sigap menangani pasien di tengah situasi rumah sakit yang cukup padat.

SLEMAN — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cangkringan, Sleman, mengungkap persoalan sanitasi di dapur SPPG Umbulharjo.

Dinas Kesehatan menemukan lalat, serangga, hingga indikasi keberadaan tikus saat memeriksa fasilitas pengolahan makanan tersebut.

Kepala Bidang P2PL Dinkes Sleman Khamidah Yuliati mengungkapkan temuan itu setelah tim melakukan pemeriksaan lingkungan dan menelusuri proses pengolahan makanan.

“Ada juga indikasi keberadaan tikus di gudang basah,” kata Khamidah, Rabu, 11 November 2026.

Lalat hingga Indikasi Tikus di Dapur

Lalat dan serangga ditemukan di sejumlah area, mulai gudang buah dan sayur, ruang persiapan, ruang pengolahan, hingga tempat pencucian peralatan masak.

Tim juga mencatat belum adanya pemantauan suhu penyimpanan bahan makanan secara rutin. Temuan tersebut menjadi catatan serius terkait penerapan higiene dan sanitasi dapur.

Dinkes mengingatkan pengelola agar menjalankan seluruh prosedur keamanan pangan secara ketat. “SOP harus dijalankan secara ketat,” tegas Khamidah.

162 Orang Mengalami Gejala

Dinkes mencatat 162 orang mengalami gangguan pencernaan setelah diduga mengonsumsi menu MBG dari SPPG Umbulharjo.

Rinciannya, 137 orang berasal dari SMP Negeri 2 Cangkringan dan 25 orang dari SMP Negeri 1 Cangkringan. Keluhan meliputi sakit perut, diare, pusing, mual, hingga muntah.

Analisis epidemiologi sementara menunjukkan semur ayam memiliki asosiasi statistik paling kuat dengan kejadian tersebut.

Namun, Dinkes menegaskan temuan itu belum membuktikan makanan tersebut sebagai penyebab keracunan.

Operasional SPPG Dihentikan

Untuk memastikan penyebab kejadian, tim mengambil sampel makanan, air untuk memasak, air sekolah, serta spesimen feses siswa untuk pemeriksaan laboratorium.

Sementara itu, operasional SPPG Umbulharjo dihentikan sementara atas rekomendasi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional melalui KPPG Sleman.

Penghentian dilakukan agar pengelola dapat menjalani evaluasi dan pembenahan menyeluruh.

SPPG baru dapat dipertimbangkan beroperasi kembali setelah hasil laboratorium keluar dan persyaratan higiene serta sanitasi terpenuhi.

Hingga laporan pemeriksaan tersebut disampaikan, penyebab pasti dugaan keracunan masih menunggu hasil laboratorium.(*)

NASIONAL

Bambang Pacul Buka Suara soal Pemakzulan Gibran, MPR Tunggu Apa?

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.49 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan konstitusional di DPR selesai.

“Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bambang menjelaskan, usulan HMP saat ini masih berada dalam ranah DPR. Karena itu, MPR belum bisa mengambil sikap ataupun memberikan penilaian lebih jauh terkait proses tersebut.

“Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” ujarnya.

Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan resmi organisasi. Menurutnya, sikap itu bukan keputusan pribadi anggota dewan.

“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” ucapnya.

Dia menilai keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk menyatukan sikap seluruh anggota dalam menentukan langkah Politik. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semata-mata didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.

“Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang menyolidkan,” katanya.

Bambang juga enggan menanggapi respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keputusan fraksi tersebut. Dia menegaskan, sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisasi, bukan pendapat perorangan.

“Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang,” ujarnya.

Sementara itu, Bambang Pacul memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Dia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat subjektif dan spekulatif. Terlebih, posisinya sebagai pimpinan MPR membuatnya harus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan.

“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” katanya.

Bambang Pacul menyebut MPR belum menerima usulan HMP pemakzulan Gibran. Dia menegaskan MPR merupakan kamar terakhir dalam proses tersebut.

NASIONAL

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Ini Kata Polisi

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.32 WIB

BANDA ACEH -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri (FB) periode 2019-2023 dikabarkan ditangkap oleh polisi.Informasi penangkapan tersebut mendadak ramai pada Rabu (11/11/2026) petang menjelang malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa informasi penangkapan tidak tepat.

Menurutnya tidak ada yang diamankan seperti informasi yang beredar.

"Tidak ada yang diamankan," jelasnya saat dikonfirmasi Rabu (11/11/2026) malam.

Kombes Budi menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi GOR Bulutangkis tempat di mana …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Budi Arie Sebut Gibran Mundur dari Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.30 WIB

BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026)

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Bongkar Peran Listyo Sigit di Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.00 WIB



BANDA ACEH -Peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, diungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Tak hanya itu, Listyo Sigit juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta (AS); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH); dan Irjen Slamet Uliandi (SU).

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ungkap Suyudi.

Suyudi mengurai, peran Listyo Sigit dalam perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Selain Listyo Sigit, tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.

Tersangka kedua berinisial SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.

SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.

Suyudi juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut berupa laporan harian dan laporan analisis.

"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.

Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.

EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo Sigit.

Perintah tersebut kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.

Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sudirman Said: Wapres Gibran Lahir dari Politik Dagang Sapi

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.02 WIB



Potret jarak dekat Gibran Rakabuming Raka mengenakan kemeja batik bermotif cokelat dan krem. Di sekelilingnya tampak beberapa orang lainnya di dalam ruangan dengan pencahayaan

JAKARTA - Kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka direspons Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said.

Gibran menyampaikan niat mundur, setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat penyetaraan ijazah yang dipakainya untuk mencalonkan diri tidak sah dan batal demi hukum.

"Jabatan Wapres Gibran lahir dari dagang sapi Politik dan penyalahgunaan kekuasaan," kata Sudirman, dikutip dari pernyataan sikap Konferensi Republik, Kamis 12 November 2026.

Menurut Sudirman, hal ini dibuka oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 90/2023 yang diketuai paman Gibran, Anwar Usman.

Hingga kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat, dan kini terbukti tidak didukung syarat paling dasar.

"Kekuasaan yang lahir dari pembengkokan aturan akan memerintah dengan pembengkokan aturan, dan pada akhirnya memakan dirinya sendiri. Itulah yang sedang kita saksikan," kata mantan Menteri ESDM ini.

Di sisi lain, Konferensi Republik turut menyoroti Polri yang dibiarkan tumbuh tanpa kontrol dan berkuasa nyaris tanpa batas dan kini menjadi bumerang.

Alat yang dipakai untuk mengamankan kekuasaan diduga berbalik menyadap presidennya sendiri, sementara di jalanan tetap dipakai untuk menekan warga.

Sedangkan tentara ditarik ke urusan sipil hingga kini hadir di ibu kota tanpa keputusan politik negara yang terbuka.

Kekuasaan dipusatkan, daerah dilemahkan, dan lembaga pengawas dirangkul masuk, hingga DPR, yang lebih dari 80 persen kursinya dikuasai koalisi, kehilangan daya koreksi.

Atas dasar itu, Konferensi Republik menyerukan kepada seluruh elemen bangsa:

Pertama, tolak penyelesaian krisis melalui dagang sapi elite. Persoalan wakil presiden harus diselesaikan melalui jalan konstitusional yang terbuka sebagaimana diatur Pasal 7A, 7B, dan 8 UUD 1945, di bawah pengawasan publik, bukan dirundingkan di balik pintu.

Kedua, kawal pengusutan penyadapan sampai tuntas, sampai ke mereka yang merencanakan dan menikmati hasilnya. Tolak penggunaan label "makar" sebagai dalih mempersempit ruang sipil. Penyadapan tanpa kontrol mengancam setiap warga, bukan hanya presiden.

Ketiga, lindungi mereka yang bersuara. Dampingi para demonstran yang ditangkap, temukan mereka yang belum diketahui keberadaannya, dan desak Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman membentuk tim pencari fakta independen atas kekerasan aparat di Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, dan kota-kota lain.

Keempat, tolak militerisasi ruang sipil dan kehadiran tentara dalam pertikaian elite. Supremasi sipil bukan tata krama, tetapi syarat hidup republik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sempat Memanas hingga Dini Hari, Polisi Ungkap Kronologi Kericuhan di Bundaran UGM

Oleh Van · 11 Nov, 18.11 WIB

JAKARTA — Ramai di media sosial diduga anggota kepolisian masuk ke area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) saat terjadi kericuhan usai penyampaian aspirasi mahasiswa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026.

Kericuhan yang terjadi di kawasan Bundaran UGM berlangsung dari Selasa hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari.

Dalam video yang beredar, polisi diduga masuk ke area kampus dan menembakkan gas air mata.

“Saya tegaskan, tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, termasuk tidak ada anggota yang merangsek ke dalam batas lokasi kampus UGM,” ujar Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Pras dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan sempat melakukan dialog dengan massa bernegosiasi agar membubarkan diri.

“Sekitar pukul 03.00 WIB atau 02.30 WIB, saya berusaha negosiasi, saya mendatangi kerumunan massa untuk saya minta tenang, mengimbau dan saya diterima,” imbuhnya.

“Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa dari pihak aparat untuk mundur ke Jalan Cik Ditiro dan massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 03.30 WIB,” jelasnya.

Kronologi Kericuhan Menurut Kepolisian

Adapun penyebab kericuhan, kata Dhimas berasal dari dugaan penganiayaan warga yang melintas dan pembakaran water barrier.

“Kami mempertimbangkan bahwa di situ juga adalah tempat pertemuan arus lalu lintas yang perlunya disterilisasi dan supaya lancar bagi aktivitas masyarakat, saya bersama dengan anggota kepolisian, baik dari Polresta Sleman dan dari Polda mendatangi lokasi untuk memadamkan api,” terangnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kubu Roy Suryo Ajukan Permohonan Uji Forensik Ijazah Jokowi ke Majelis Hakim

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.34 WIB

BANDA ACEH - Tim penasihat hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Surat permohonan tersebut diajukan dalam persidangan kasus fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo.

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun menyatakan, permohonan ini penting untuk menguji keaslian ijazah fisik yang sebelumnya diperlihatkan di persidangan.

Pihaknya meminta agar ijazah fisik milik Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan dengan setidaknya …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tindak Lanjuti Usulan HMP Pemakzulan Gibran, DPR Gelar Paripurna Besok

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.25 WIB

BANDA ACEH -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ratusan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna.

“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

"Jadi, akan kami rapat pimpinan (Rapim) dan nanti akan kami Bamus (Badan Musyawarah)kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan,” sambungnya.

Saan mengungkapkan bahwa Rapat Paripurna DPR terdekat akan digelar pada Kamis besok, 12 November 2026.

“Dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10.00 WIB-an,” katanya.

Seluruh Fraksi di DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Anggota …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

3 Mahasiswa UGM Dilaporkan Hilang usai Demo Ricuh di Yogyakarta

Oleh Redaksi · 12 Nov, 09.31 WIB



BANDA ACEH - Kericuhan demonstrasi Hari Pahlawan di Yogyakarta berbuntut panjang. Tiga mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaporkan hilang setelah mengikuti aksi yang berujung bentrokan pada Selasa (10/11/2026).

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Bonifasius Alfanomega, Ayodhya Radityo Prabhasworo, dan Muhammad Fathir Firdaus. Informasi mengenai hilangnya mereka diunggah melalui akun Instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (Komahi) dan Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (Komap) UGM.

Kedua organisasi mahasiswa tersebut menyertakan keterangan 'Alerta' dalam unggahan pencarian. Hingga Rabu (11/11/2026), keberadaan ketiganya belum dipastikan berdasarkan informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut.

UGM turun tangan menelusuri keberadaan mahasiswa yang belum bisa dihubungi, termasuk mereka yang diduga diamankan aparat kepolisian. Kampus juga menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang ditahan serta bantuan medis dan biaya perawatan bagi mereka yang terluka.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, mengatakan kampus telah mengerahkan tim untuk mendatangi Polda DIY guna mencari informasi sekaligus mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan.

UGM mencatat delapan mahasiswa ditangkap dalam rangkaian kericuhan tersebut. Enam di antaranya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu dari Fakultas Filsafat, dan satu lainnya dari Fakultas Kehutanan.

"Ada delapan. Itu enam dari Fisipol, satu Fakultas Filsafat, dan satu Fakultas Kehutanan," kata Wening di UGM, Rabu (11/11/2026).

Selain mahasiswa yang ditangkap, kampus juga menerima informasi mengenai mahasiswa dan alumni yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka-luka. Namun, identitas mereka masih dalam proses verifikasi.

Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, mengatakan pihak fakultas telah mengirim tim ke Mapolda DIY untuk memastikan keberadaan mahasiswa yang diduga ditangkap. Namun, tim tersebut belum berhasil bertemu dengan mereka.

Gabriel menyebut sejumlah mahasiswa sempat mengirim pesan yang mengabarkan bahwa mereka ditangkap. Lokasi terakhir yang dilaporkan berada di sekitar Gedung DPRD DIY dan Bundaran UGM.

Kampus berharap mahasiswa yang diamankan dapat segera dipulangkan setelah keberadaan dan kondisi mereka dipastikan. UGM juga masih menelusuri informasi mengenai mahasiswa lain yang belum diketahui keberadaannya.

Tindakan Represif Aparat

Di tengah upaya pencarian dan pendampingan mahasiswa, UGM menyampaikan protes keras terhadap dugaan tindakan represif aparat dalam penanganan demonstrasi.

Wening menegaskan kampus menolak segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Oleh Redaksi · 12 Nov, 10.56 WIB



BANDA ACEH - Ada perbedaan keterangan mengenai tujuan pemberian uang Rp800 juta dari PT Summarecon Agung Tbk kepada Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), Hercules Rosario Marshal dalam penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hercules sebelumnya mengaku uang tersebut diberikan untuk membantu biaya perjalanan ke luar negeri sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare di Kabupaten Bogor.

Namun, KPK mengungkapkan uang tersebut diduga berkaitan dengan jasa pengamanan lahan-lahan yang dikelola Summarecon di wilayah tersebut.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan blokir dan sertifikasi HGB di Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Hercules dari PT Summarecon.

"Di mana dalam pengurusan pengelolaan lahan yang dilakukan oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor, PT SMC ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantor Bogor dalam pengurusan HGB dan juga juga blokir, tapi juga PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada HCL (Hercules) ya dalam hal untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor tersebut," kata Budi kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Budi menjelaskan, Hercules kemudian berinisiatif mengembalikan uang Rp800 juta tersebut kepada KPK karena merasa pemberian itu berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

"Maka kemudian HCL ini merasa bahwa uang tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK, maka yang bersangkutan kemudian secara inisiatif menyerahkan dan mengembalikan uang tersebut kepada KPK sehingga penyidik melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp800 juta tersebut," ujarnya.

Menurut Budi, penyerahan uang dan kehadiran Hercules memenuhi panggilan penyidik membantu proses pengungkapan perkara, khususnya untuk menelusuri bagaimana Summarecon menyiapkan uang bagi sejumlah pihak.

"Artinya apa yang dilakukan oleh HCL ini baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang tersebut dan juga memenuhi panggilan penyidik pada hari ini tentunya adalah membantu proses penyidikan yang sedang berjalan karena memang informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh HCL ini kemudian membantu penyidik untuk kemudian bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya," jelas Budi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Buka Lomba SJS DWP Aceh, Kak Na Imbau Kaum Bapak Stop Merokok

Oleh Redaksi · 11 Nov, 22.48 WIB

BANDA ACEH – Senam Jantung Sehat merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan jantung pribadi dan keluarga. Namun, upaya menjaga kesehatan jantung keluarga juga menuntut kerja sama kaum bapak, salah satunya adalah dengan stop merokok di rumah.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Lomba Senam Jantung Sehat seri III antar DWP Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Instansi Vertikal, di Aula DWP Aceh, Rabu (11/11/2026).

“Jangan sampai kaum ibunya sudah rutin mengikuti senam jantung sehat tapi bapaknya malah merokok di rumah, tentu kan jadi tidak sehat. Untuk itu, semua pihak harus memahami bahwa menjaga kesehatan jantung keluarga bukan semata mengikuti senamnya, tetapi juga menjaga pola hidup sehat di tingkat keluarga, termasuk stop kebiasaan merokok,” kata Kak Na berpesan.

Dalam sambutannya, Kak Na juga mengungkapkan beberapa kasus penyakit jantung pada anak yang disebabkan oleh kebiasan buruk orang tua di rumah, yaitu merokok.

Kepada para peserta yang merupakan perwakilan dari DWP SKPA, Kak Na berpesan untuk mengikuti lomba dengan penuh semangat. Kak Na berjanji, ke depan akan membuat event lomba yang lebih besar, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat provinsi.

“Ke depan bisa dibuat ajang lomba lebih luas, seleksi di tingkat kabupaten dan pemenangnya akan bersaing di tingkat Aceh. Seluruh peserta harus semangat. Tahun lalu, tim Senam Jantung Sehat Aceh berhasil keluar sebagai Juara Pertama pada Lomba Senam Jantung Sehat tingkat nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat,” ungkap Kak Na menyemangati peserta.

“Meski tidak menang, setidaknya kita semua tetap sehat karena senam ini. Ingat, senamnya jangan hanya saat persiapan dan saat lomba tapi terus rutinlah berolahraga dalam keseharian,” imbau Kak Na.

Sebelumnya, Ketua DWP Aceh Fitriani Taufik, dalam sambutannya menjelaskan, Lomba Senam Jantung Sehat seri III ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun DWP.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Gibran Dinilai Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.45 WIB



BANDA ACEH - — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustofa dalam rapat bersama perwakilan pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemerintah Aceh Pertegas Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.41 WIB

JAKARTA – Pemerintah Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut disampaikan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam uji publik bertema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik” tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Edi Yandra hadir memaparkan strategi dan pencapaian Pemerintah Aceh mewakili Gubernur Aceh.

Tahapan uji publik ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Evaluasi Monev KIP 2026. Sebelumnya, Pemerintah Aceh berhasil melaju ke tahap ini setelah meraih nilai sempurna (100) pada tahapan pengisian Self-Assessment …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Wakil Presiden Gibran Mundur, PKB: HMP Bubar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 09.27 WIB



BANDA ACEH - Informasi tentang mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakubiming Raka dari jabatannya beredar santer di publik. Bagaimana kelanjutan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR jika wapres benar-benar mundur dari jabatannya?

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan pihaknya menghormati atas pengunduran Wapres jika kabar tersebut benar adanya.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tegas Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini mengatakan proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) secara resmi diusulkan lebih dari 120 anggota dari seluruh fraksi di DPR.

“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tegas Khozin.

Namun demikian, Khozin mengatakan apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tak berlanjut karena kehilangan objek, serta kemudian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” tegas Khozin.

Lebih lanjut ia menguraikan, paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden, Presiden mengusulkan 2 calon wakil presiden beserta kelengkapannya kepada pimpinan MPR.

“Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, Presiden diminta untuk mengusulkan dua nama cawapres paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pemilihan Wapres,” sebut Khozin.

Khozin menegaskan apapun bentuk penyelesaian persoalan ijazah Wapres, apakah melalui mekanisme HMP atau pengunduran diri, ia berharap persoalan tersebut segera berakhir.

“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” tandas Khozin.

Langkah evaluatif dan korektif terkait regulasi kepemiluan termasuk pengetatan mekanisme tahapan pendaftaran, selanjutnya akan diakomodir dalam revisu UU Pemilu.

“Kebetulan saat ini kami di panja Komisi II terkait revisi UU Pemilu sedang berjalan, sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk pikuk ini jadi bagian poin penting yang harus disempurnakan,” tegas Khozin

NASIONAL

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib Usulan HMP Pemakzulan di DPR?

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.23 WIB



BANDA ACEH - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden (wapres) tidak akan dilanjutkan. Menurut Khozin, pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres membuat objek pembahasan HMP tidak lagi relevan.

"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik ijazah. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kembali fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

"Banyak agenda, banyak PR yang perlu kita tuntaskan, banyak rakyat yang menunggu kerja nyata kita untuk program-program yang berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ucap Khozin.

Lebih lanjut, Khozin mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dan kepastian mekanisme pengunduran diri Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU MD3.

Dia menjelaskan, terdapat tahapan waktu bagi presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih satu dari dua nama tersebut.

"Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden," ucap Khozin.

Meski demikian, Khozin mengaku pihaknya belum mendapat informasi mengenai bentuk dan tindak lanjut surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR.

"Tadi kita sudah ketahui bersama Pak Gibran Rakabuming Raka sudah hadir secara langsung dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Nah, kita sampai detik ini masih belum diinformasikan seperti apa bentuk, wujud, dan sikap dari surat itu. Kita tunggu nanti arahan dari pimpinan," pungkasnya

LIFESTYLE

Pacaran dengan AI Bikin Gangguan Jiwa? Psikiater Ungkap Kondisi yang Perlu Diwaspadai!

Oleh Van · 11 Nov, 17.24 WIB

JAKARTA — Fenomena pacaran dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ramai diperbincangkan setelah muncul cerita warganet yang menjalin hubungan emosional dengan chatbot.

Interaksi tersebut bahkan digambarkan berlangsung intens, mulai dari percakapan romantis hingga melakukan panggilan suara dalam waktu lama.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai batas hubungan manusia dengan teknologi dan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan mental.

Pacaran dengan AI, Apakah Termasuk Gangguan Jiwa?

Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk dicintai, didengarkan, dipahami, dan diterima oleh orang lain.

Chatbot AI dapat memberikan respons cepat, perhatian, serta komunikasi yang terasa personal. Kondisi tersebut berpotensi membuat pengguna merasa memiliki hubungan emosional dengan teknologi.

Namun, menjalin hubungan romantis dengan AI tidak otomatis menunjukkan seseorang mengalami gangguan jiwa.

Istilah AI-induced psychosis atau psikosis yang dikaitkan dengan penggunaan AI mulai menjadi perhatian dalam diskusi kesehatan mental, meski belum diakui sebagai diagnosis klinis resmi.

Psikosis merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan membedakan kenyataan dengan sesuatu yang tidak nyata, termasuk melalui halusinasi atau waham.

Dalam penelitian yang dipublikasikan Stanford pada 20 April 2026, peneliti menganalisis 19 transkrip percakapan manusia dengan chatbot.

Penelitian tersebut menemukan pola interaksi ketika chatbot justru menguatkan keyakinan keliru pengguna melalui respons yang terus membenarkan dan memberikan validasi.

Ketergantungan AI Bisa Memengaruhi Kesehatan Mental

Kementerian Kesehatan RI sebelumnya juga mengingatkan risiko penggunaan AI untuk menilai kondisi kesehatan mental secara mandiri.

Psikiater FKUI-RSCM, dr. Kristiana Siste, mengatakan AI dapat memberikan hasil yang keliru atau berlebihan sehingga tidak boleh dijadikan dasar diagnosis.

“AI bagus jika digunakan bersama-sama oleh keluarga. Orang tua harus mengerti dulu lalu mengajak anaknya berinteraksi bersama,” ujarnya dalam Dialog Multistakeholder Towards a Smart Governance pada Rabu, 26 November 2025.

Ketergantungan berlebihan terhadap chatbot juga berpotensi membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa lebih dipahami oleh AI.

WHO dalam publikasinya pada 20 Maret 2026 turut menyoroti penggunaan AI generatif untuk dukungan emosional, terutama di kalangan anak muda.

WHO merekomendasikan agar dampak AI terhadap kesehatan mental, termasuk ketergantungan emosional, menjadi bagian dari penilaian dan pemantauan teknologi tersebut.

Karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti hubungan sosial maupun tenaga …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Peukan Bada Terima 171 Mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Abulyatama untuk Laksanakan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Gerontik

Oleh Hamdani · 11 Nov, 21.02 WIB

KOTA JANTHO - Kecamatan Peukan Bada menerima sebanyak 171 mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Abulyatama (Unaya) yang akan melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Gerontik di wilayah tersebut, Rabu 11 November 2026 di Aula UDKP Kecamatan Peukan Bada.

Camat Peukan Bada, Salamuddin ZM SE dalam sambutannya menyambut baik baik program Praktik Klinik D3 Keperawatan Unaya yang ditempatkan di gampong-gampong Kecamatan Peukan Bada.

"Kehadiran mahasiswa di gampong-gampong diharapkan dapat membantu warga dalam layanan kesehatan dan memberikan pengetahuan mengenai berbagai hal terkait kesehatan, "tambahnya.

Selain itu Salamuddin juga mengharapkan dengan program praktik klinik ini sebagai bagian silaturahmi mahasiswa D3 Keperawatan Unaya dengan warga Kecamatan Peukan Bada.

Sementara itu Ketua Prodi D3 Keperawatan Unaya, Ns. Urip Pratama, M.Kep mengatakan kegiatan praktik klinik ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa keperawatan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga dan kelompok lanjut usia (lansia).

"Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengkajian kesehatan keluarga, mengidentifikasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Ambil Kesepakatan HMP Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 12 Nov, 08.06 WIB



BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk mengambil kesepakatan atas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) pada, Kamis (12/11/2026) pagi.

Hal itu diketahui berdasarkan surat undangan rapat yang ditujukan pada pimpinan dan anggota DPR. Adapun rapat itu didasar atas hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi pada 11 November 2026.

"Acara pengumuman usul penggunan hak Anggota DPR RI," demikian bunyi agenda rapar yang tertera dalam surat undangan tersebut.

Selain itu, rapat juga akan mengambil keputusan tingkat I atas RUU tentang Tata Cara Pembentukan UU menjadi usul inisiatif DPR dan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Statistik.

Sedianya, rapat paripurna itu semula akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB. Namun, kesekretariatan mengubah waktu pelaksanaan rapat paripurna menjadi pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, Pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sedianya lebih dari 100 legislator mengajukan nama menjadi pengusul HMP pemakzulan Gibran.

Hal itu diketahui setelah pimpinan DPR menggrlar rapat bersama legislator pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR, Rabu (11/11/2026). Adapun rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal

Saan, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebanyak 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026).

Adapun 120 anggota yang sudah menadatangani hak menyatakan pendapat berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.

Saan pun menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan HMP pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Sedianya, usulan itu akan diambil keputusan bersama dalam forum rapat paripurna.

"Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," kata dia

NASIONAL

Gibran Mundur dari Wapres, Ini Hak Pensiun dan Fasilitas yang Tetap Diterima

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.27 WIB



BANDA ACEH - - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Meski telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.

Undang-undang tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Di antaranya biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.

Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri

ACEH

Satgas TMMD Kodim 0108/Agara Pastikan Kualitas Pembangunan RTLH di Lawe Sagu Hulu

Oleh Redaksi · 11 Nov, 16.35 WIB

KUTACANE – Komitmen Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-130 Kodim 0108/Aceh Tenggara (Agara) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lawe Sagu Hulu.

Saat ini, pengerjaan rumah tersebut telah memasuki tahap finishing dengan mengutamakan ketelitian, kerapian, dan kualitas pada setiap bagian bangunan, Selasa (10/11/2026).

Memasuki tahap akhir pengerjaan, personel Satgas TMMD ke-130 melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan. Setiap detail pekerjaan diperiksa dengan cermat guna memastikan tidak ada bagian yang terlewat maupun kekurangan yang dapat memengaruhi kualitas hasil pembangunan.

Pemeriksaan meliputi kerapian dinding, kondisi lantai, bagian atap, pintu, jendela, serta kelengkapan bangunan lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar memenuhi aspek kelayakan, keamanan, dan kenyamanan sehingga dapat ditempati dengan baik oleh keluarga penerima manfaat.

Dansatgas TMMD ke-130 Kodim 0108/Agara, Letkol Czi Arya Murdyantoro, menegaskan bahwa kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama hingga seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.

Menurutnya, tahap finishing bukan sekadar penyempurnaan tampilan bangunan, melainkan bagian penting dari proses pembangunan untuk memastikan setiap rumah memiliki kualitas yang baik serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya.

Ia juga menekankan kepada seluruh personel Satgas agar senantiasa memperhatikan setiap detail pekerjaan, sehingga hasil pembangunan RTLH benar-benar sesuai dengan tujuan program TMMD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui pembangunan RTLH ini, kami ingin memastikan masyarakat penerima manfaat dapat memiliki tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, setiap tahapan pekerjaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kualitas,” tegasnya.

Program pembangunan RTLH tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian TNI terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam membantu warga yang membutuhkan hunian lebih layak. Kehadiran program ini diharapkan dapat memberikan perubahan positif terhadap kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Bagi Satgas TMMD ke-130 Kodim 0108/Agara, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya sebuah bangunan, tetapi juga dari kualitas serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan semakin matangnya tahap finishing, Satgas TMMD terus mengoptimalkan pengerjaan agar rumah tersebut dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

DKP Aceh Dorong Kelompok Perempuan Pesisir Kembangkan Olahan Tiram melalui Gemarikan

Oleh Hamdani · 11 Nov, 20.52 WIB

ACEH BESAR - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tidak hanya menjadi kampanye peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga dimanfaatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh sebagai ruang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.

Melalui Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Subkor P2HP), DKP Aceh memberikan pelatihan diversifikasi produk olahan berbahan dasar tiram kepada Kelompok Cut Nyak Tiram di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (11/11/2026).

Dalam pelatihan tersebut, anggota kelompok mempraktikkan langsung pembuatan dua produk olahan, yakni stik keju tiram dan nugget tiram. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk pangan yang lebih beragam, bernilai tambah, dan memiliki peluang pasar.

Kasubkor P2HP DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., mengatakan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga masyarakat pesisir.

"Kami mendorong kelompok masyarakat agar mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah, higienis, dan bergizi. Harapannya, masyarakat tidak hanya mengonsumsi ikan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi perikanan di daerahnya," ujar Fitriani.

Menurutnya, pelatihan diversifikasi produk perlu diikuti dengan pengembangan mutu, inovasi, kemasan, dan pemasaran agar produk olahan kelompok dapat …

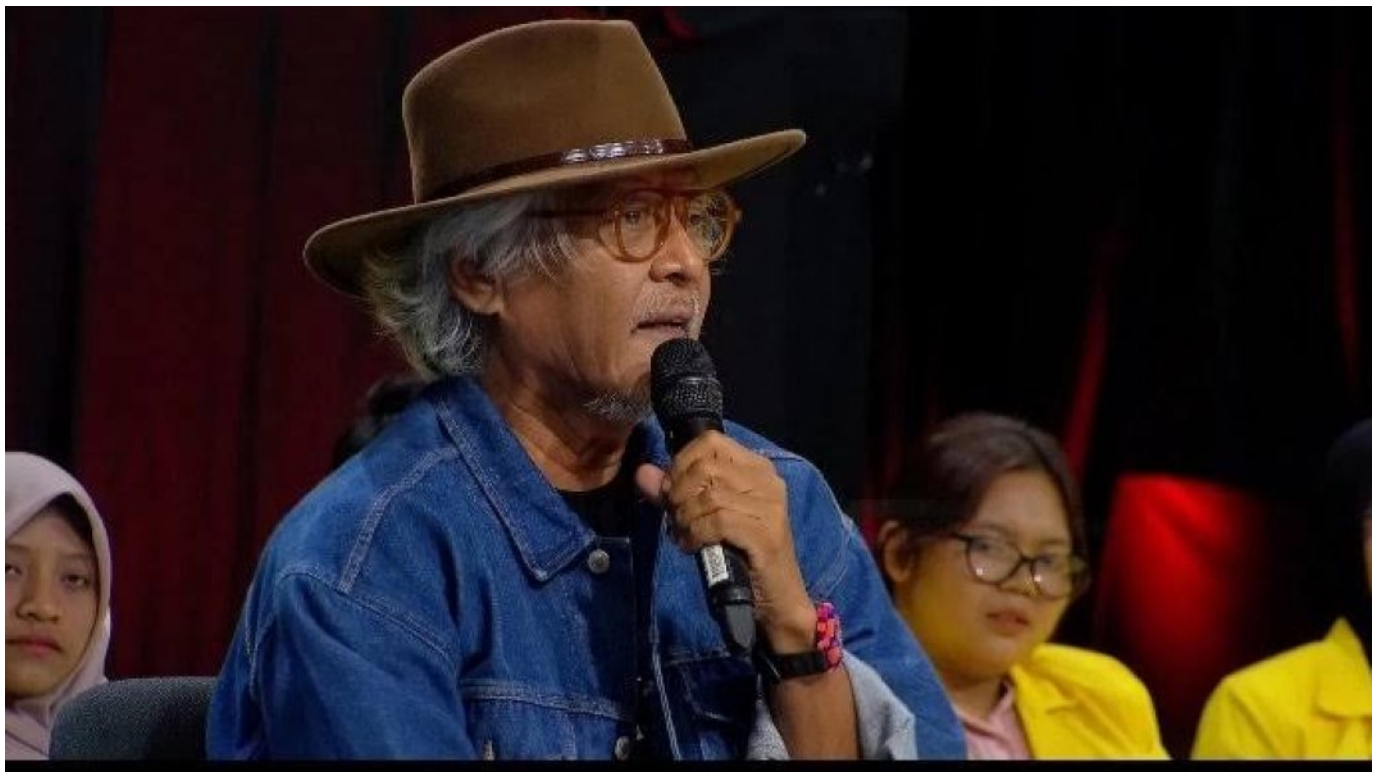
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sujiwo Tejo Minta Gibran Dimakzulkan, Bukan Mengundurkan Diri

Oleh Redaksi · 12 Nov, 07.43 WIB



BANDA ACEH - Budayawan Sujiwo Tejo meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, bukan mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap polemik masa depan Gibran di tengah berkembangnya desakan agar putra sulung Joko Widodo itu meninggalkan kursi Wakil Presiden.Sujiwo Tejo menyampaikan pandangannya melalui media sosial, Rabu (11/11/2026). Ia menyinggung konsekuensi berbeda antara pengunduran diri dan pemakzulan, terutama terkait hak keuangan setelah seseorang tidak lagi menjabat.

“Kalau mengundurkan diri, masih mendapat uang pensiun. DPR tidak tolak pengunduran diri Gibran,” kata Sujiwo Tejo.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang diperdebatkan bukan hanya apakah Gibran akan meninggalkan jabatan Wakil Presiden, melainkan juga melalui mekanisme konstitusional apa hal itu dilakukan.

Pernyataan Sujiwo Tejo muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan Prabowo dan Gibran tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Menurut Prasetyo Hadi, niat pengunduran diri itu disampaikan di tengah dinamika Politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.

Namun, hingga Selasa malam, DPR menyatakan belum menerima surat resmi pengunduran diri Gibran.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan DPR tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengunduran diri Wakil Presiden. Menurutnya, pengunduran diri merupakan salah satu mekanisme pemberhentian yang dikenal dalam konstitusi.

“Kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8,” kata Doli sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026).

Secara konstitusional, pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden memang memiliki prosedur tersendiri. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

Pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemakzulan sebagai berikut:

1. DPR terlebih dahulu mengajukan pendapatnya kepada MK.
2. MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari.
3. Jika MK membenarkan pendapat DPR, parlemen meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pesan Menyentuh Jokowi usai Gibran Mundur dari Kursi Wapres

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.32 WIB



BANDA ACEH – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan menyentuh usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres).

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Surat itu diserahkan saat Gibran bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya.

Jokowi mengaku sudah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan hanya sementara. "Dalam jabatan Politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," kata Jokowi di Solo. Kamis (12/11/2026).

Jokowi mengungkapkan, Gibran sudah berkomunikasi dengan dirinya sebelum memutuskan mundur. Jokowi mengaku belum mengetahui langkah Gibran selanjutnya setelah mengundurkan diri. "Nggak tahu kan belum resmi," ucapnya.

Dia menegaskan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam program program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres sebelumnya dibenarkan mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. "Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar mundurnya Gibran, Rabu (11/11/2026).

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di PTUN.

Gibran mengungkapkan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran

EDUKASI

Advokat Minta Hakim Adil dalam Kasus Dana BOS SMAN 9 Banda Aceh

Oleh Redaksi · 11 Nov, 18.06 WIB

BANDA ACEH – Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 9 Banda Aceh kini memasuki fase pembuktian. Di tengah proses hukum tersebut, tim advokat melalui Justice Delicty meminta majelis hakim mengedepankan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjerat JM, bendahara Dana BOS sekolah tersebut.

Harapan itu muncul ketika seluruh fakta hukum mulai diuji di ruang persidangan. Pihak pembela menginginkan agar nasib hukum JM ditentukan berdasarkan kekuatan alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum yang terungkap selama persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran Dana BOS SMAN 9 Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah Kejaksaan Negeri Banda Aceh menaikkan penanganannya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam pengungkapan awal perkara, Kejari Banda Aceh mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut. Penyidik juga telah meminta keterangan puluhan orang yang sebagian besar berasal dari lingkungan internal sekolah guna mendalami dugaan penyimpangan yang terjadi.

Seiring perkembangan penanganan perkara, proses hukum kini berlanjut ke meja hijau dengan agenda pembuktian. Tahapan ini menjadi momentum penting bagi jaksa penuntut umum maupun pihak pembela untuk menguji setiap bukti dan menyampaikan argumentasi masing-masing di hadapan majelis hakim.

Tim advokat yang mendampingi JM berharap jalannya persidangan berlangsung secara objektif, terbuka, dan tidak keluar dari koridor hukum. Mereka menilai setiap proses pemeriksaan harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh pihak untuk mengemukakan fakta dan pembelaannya.

Selain itu, majelis hakim diharapkan tidak mengabaikan satu pun fakta yang muncul selama persidangan. Keterangan para saksi, dokumen pendukung, alat bukti, hingga argumentasi pembelaan dinilai harus diperiksa secara menyeluruh sebelum keputusan hukum diambil.

Bagi tim pembela, putusan terhadap JM harus lahir dari proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian terhadap terdakwa, menurut harapan mereka, tidak boleh dibangun hanya dari dugaan, persepsi, maupun opini publik yang berkembang di luar ruang sidang.

Praduga Tak Bersalah Harus Tetap Dihormati

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya hak-hak setiap orang yang menjalani proses peradilan. Keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Karhutla Kalimantan Belum Padam, Papua Kian Membara

Oleh Rut sw · 11 Nov, 16.25 WIB

ERTANYAAN besar hari ini, “ Negara Kemana?”. Dari data yang dicatat BNPB terdapat lonjakan kasus karhutla secara keseluruhan yang telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menambahkan ada peningkatan 66 persen titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan.

Sedihnya, kini wilayah subur yang menjadi habitat asli bagi walabi lincah, burung cendrawasih, dan musamus (sarang rayap raksasa setinggi manusia buatan serangga lokal) menjadi sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik.

Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober.

Terutama di Merauke, seperti di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga hampir separuh titik api belum padam.

Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.

Kemudian, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Sungguh, betapa kezaliman ini akan menjadi saksi di akhirat kelak, terlebih ketika peran negara dipertanyakan.

Berbulan-bulan rakyat di Kalimantan tak lagi bisa melihat birunya langit karena asap hasil pembakaran hutan dan lahan yang lambat ditangani, nyawa sukarelawan dan anak-anak sudah tak lagi bisa diitung, ternyata karhutla Papua lebih mengerikan, semakin membongkar …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jika Parlemen Tak Makzulkan Gibran, Mahfud MD: Politik Nggak Akan Stabil

Oleh Redaksi · 12 Nov, 08.17 WIB



BANDA ACEH -Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa situasi Politik nasional berpotensi terus bergejolak apabila DPR dan MPR tidak mengambil langkah pemberhentian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikannya.

Mahfud menilai, keputusan parlemen untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan tetap memiliki konsekuensi politik. Sebab, kontroversi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah berkembang luas di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Close The Door yang dikutip pada Rabu (11/11/2026). Di mana peluang bahwa agenda politik pemberhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di tingkat DPR RI atau MPR RI bisa saja tidak berjalan tuntas.

Ditegaskan Mahfud, bahwa secara politik DPR memang memiliki kemungkinan untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan. Namun, keputusan semacam itu menurutnya akan menimbulkan risiko politik bagi parlemen.

“Bisa saja, bisa saja (DPR tidak memakzulkan). iya itu hukum politiknya begitu, meski dalam keadaan begini DPR menyatakan tidak begitu,” kata Mahfud.

Mahfud menilai, apabila persoalan tersebut dianggap sebagai cacat hukum sejak awal, DPR seharusnya mempertimbangkan konsekuensi konstitusional apabila tidak mengambil langkah terhadap persoalan tersebut.

“Tetapi kalau dianggap sejak awal tidak sah mestinya DPR melanggar konstitusi kalau tidak mencabut sesuatu yang sejak awal cacat hukum ini,” ujarnya.

Menurut Mahfud, sikap DPR dalam persoalan tersebut akan menjadi catatan politik tersendiri. Apalagi, saat ini sudah ada 120 anggota DPR yang disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.

Ia menjelaskan bahwa proses politik tetap dapat berjalan meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara lembaga negara mengenai konsekuensi putusan pengadilan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa keputusan DPR bukanlah akhir dari seluruh proses. Jika DPR menyetujui pendapat mengenai pemberhentian Wakil Presiden, perkara tersebut masih harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum dibawa ke MPR.

“Bahkan kalau DPR menyatakan harus dipecat lalu diserahkan ke MK harus juga, ‘Oh benar DPR harus pecat’, ini kan nanti kan larinya ke MPR. Kalau MPR menyatakan tidak, ndak bisa, nah jadi memang begitu aturannya. Tetapi ini kontrol politik kan terus bekerja, berjalan,” tuturnya.

Namun, apabila proses politik tersebut tidak menghasilkan keputusan pemberhentian, Mahfud memperkirakan kontroversi di tengah masyarakat tidak akan berhenti.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Temui Prabowo di Istana sebelum Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.13 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan pantauan di depan halaman Istana Kepresidenan pukul 10.47 WIB, Gibran telah selesai menghadap Prabowo dan keluar dari Istana Merdeka pada Kamis siang. Gibran tampak mengenakan jas hitam dan dasi merah.

Gibran kemudian diantar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuju mobilnya, Toyota Kijang Innova Zenix berwarna hitam.

Setelah Gibran masuk ke dalam mobil, kendaraan tersebut langsung meninggalkan kawasan Istana Merdeka. Prasetyo Hadi tampak memberikan gestur hormat saat mobil Gibran melaju keluar.

Setelah itu, Gibran dilaporkan akan bertolak menuju Gedung DPR/MPR RI, Senayan, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Gibran akan mendatangi MPR pada Kamis siang untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajaran Polri di Gedung DPR RI, Kamis.

"Berikutnya, tokoh kita, Benny Khabur Harman, karena beliau ada acara MPR, dipersilakan bicara duluan. Jam 11 Gibran menyerahkan surat pengunduran diri," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, sejumlah pimpinan MPR telah berdatangan ke Gedung Nusantara III sejak Kamis pagi sekitar pukul 10.05 WIB.

Mereka di antaranya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Rusdy Kirana, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P Bambang

Saat ditanya mengenai kabar kedatangan Gibran, Bambang meminta awak media bersabar dan menunggu perkembangan lebih lanjut. "Sudahlah, kau tunggu sebentar lagi," ujar Bambang.

Dia juga menegaskan MPR akan menerima siapa pun yang hendak bertamu.

"Kalau ada tamu kita terima, nanti," pungkasnya

SPORT

Rekomendasi Aplikasi Jadwal Bola Terbaik untuk Penggemar Sepak Bola

Oleh Redaksi · 11 Nov, 17.39 WIB

BANDA ACEH - Penggemar sepak bola bisa menggunakan aplikasi jadwal bola untuk mengetahui waktu pertandingan, memantau kompetisi favorit, hingga mendapatkan notifikasi ketika klub kesayangan akan bermain.

Beberapa aplikasi bahkan menyediakan skor langsung, statistik, klasemen, dan informasi susunan pemain.

Pilihan aplikasinya cukup beragam, mulai dari Sofascore, Flashscore, FotMob, OneFootball, hingga LiveScore.

Setiap platform memiliki keunggulan berbeda, sehingga kamu bisa memilih layanan yang paling sesuai dengan kebiasaan mengikuti pertandingan.

Tidak perlu membuka banyak situs untuk sekadar mencari tahu pertandingan apa yang berlangsung malam ini.

Berikut rekomendasi aplikasi yang layak dipertimbangkan oleh penggemar sepak bola.

Jadwal pertandingan sepak bola tersebar di berbagai kompetisi dan negara.

Dalam satu hari, bisa ada puluhan pertandingan dari liga domestik, kompetisi antarklub Eropa, hingga pertandingan internasional.

Situasi tersebut membuat penggemar sepak bola membutuhkan sumber informasi yang praktis.

Aplikasi jadwal bola membantu mengumpulkan informasi pertandingan dalam satu tempat sehingga pengguna tidak harus mencari jadwal secara manual.

Selain menampilkan tanggal dan waktu kick-off, sejumlah aplikasi juga menyediakan informasi tambahan yang berguna sebelum dan selama pertandingan berlangsung.

1. Mengetahui jadwal pertandingan dari berbagai liga

Salah satu fungsi utama aplikasi sepak bola adalah menampilkan agenda pertandingan dari berbagai kompetisi.

Kamu bisa mencari pertandingan dari kompetisi populer seperti:

• Premier League Inggris.
• La Liga Spanyol.
• Serie A Italia.
• Bundesliga Jerman.
• Ligue 1 Prancis.a
• UEFA Champions League.
• UEFA Europa League.
• Piala Dunia.
• BRI Super League Indonesia.

Ketersediaan kompetisi bisa berbeda pada setiap aplikasi. Karena itu, pastikan platform yang dipilih memiliki cakupan liga yang ingin kamu ikuti.

2. Mendapatkan notifikasi sebelum pertandingan dimulai

Fitur notifikasi menjadi salah satu alasan banyak penggemar menggunakan aplikasi sepak bola.

Kamu bisa mengikuti klub favorit dan mengaktifkan pemberitahuan pertandingan. Beberapa aplikasi juga memungkinkan pengguna menerima notifikasi ketika terjadi gol, kartu merah, pergantian pemain, atau pertandingan berakhir.

Dengan begitu, kamu tidak harus terus-menerus membuka aplikasi untuk memeriksa perkembangan pertandingan.

3. Memantau skor dan statistik pertandingan

Aplikasi sepak bola modern tidak hanya menampilkan jadwal. Beberapa di antaranya menyediakan informasi statistik seperti penguasaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bupati Aceh Barat Hadiri Zikir Kebangsaan di UTU, Doakan Presiden Prabowo

Oleh Biro Meulaboh · 11 Nov, 16.42 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri Zikir Kebangsaan di halaman Kampus UTU, Meureubo, Rabu (11/11/26),FOTO/HAI

MEULABOH– Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri Zikir Kebangsaan dan doa bersama di halaman Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional 2026 itu turut dihadiri Rektor UTU bersama civitas akademika, para ulama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para santri.

Bupati Tarmizi mengatakan, zikir dan doa bersama tersebut digelar untuk mendoakan para pahlawan, Presiden RI Prabowo Subianto, serta keselamatan bangsa dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Muslim Arbi: Gibran Mundur dari Wapres, Proses Hukum Harus Tetap Berjalan

Oleh Redaksi · 12 Nov, 07.38 WIB



BANDA ACEH - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menghentikan proses hukum atas dugaan persoalan dokumen pendidikan yang pernah digunakan saat pencalonannya sebagai Wali Kota Solo maupun calon Wakil Presiden.Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menegaskan, persoalan hukum yang menyangkut Gibran harus tetap dituntaskan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan Wakil Presiden.

"Pengunduran diri dari jabatan publik tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana ataupun tanggung jawab hukum seseorang. Proses penegakan hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, bukan berdasarkan jabatan Politik yang sedang dipegang," kata Muslim kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Muslim menilai, dugaan penggunaan dokumen pendidikan yang bermasalah harus diperiksa secara transparan. Menurut dia, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan politik mengenai kelayakan Gibran menjadi Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.

Ia menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

"MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan tersebut. Putusan lengkapnya diunggah MA pada 11 November 2026," tegasnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.

Menurut Muslim, dua putusan tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum dan lembaga negara yang memiliki kewenangan. Ia meminta agar persoalan dugaan pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sah tidak dibiarkan menggantung. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana atau tidak.

Muslim juga menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat DPR tidak boleh dihentikan hanya karena Gibran menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Proses politik dan konstitusional yang sudah berjalan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

"Gibran dapat dimintai keterangan dan dipanggil DPR apabila diperlukan dalam pembahasan persoalan tersebut," tegasnya.

Dinamika di DPR sendiri semakin menguat. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aliansi Masyarakat Sipil Turunkan Foto Wapres Gibran di Gedung DPRD Jabar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 21.09 WIB



BANDA ACEH – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di Gedung DPRD, Kamis (12/11/2026).

Aksi pencopotan foto wapres itu terjadi saat mereka menyampaikan aspirasi Politik terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi orang nomor dua di Indonesia.

Usai mencopot foto wapres, massa membalikkan posisi bingkai foto tersebut karena menilai yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai wapres.

Menanggapi aksi pencopotan foto Wakil Presiden tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa menegaskan, tindakan menurunkan foto Gibran bukanlah langkah lembaga legislatif daerah.

Menurut Buky Wibawa, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat tetap berpegang pada prosedur ketatanegaraan dan akan menunggu keputusan resmi negara terkait status pengunduran diri wakil presiden.

Dia menegaskan, jika ada pihak yang menurunkan foto Wakil Presiden di lingkungan gedung Dewan, hal tersebut murni merupakan tindakan pribadi dari peserta aksi dan bukan sikap institusi DPRD Jawa Barat.

Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka pada Kamis siang telah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sesuai ketentuan tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku, surat pengunduran diri tersebut akan diproses oleh MPR dalam tenggang waktu maksimal 60 hari, sementara presiden memiliki waktu selama 14 hari untuk mengusulkan calon pengganti wakil presiden

LINGKUNGAN

BNPB Kantongi 3 Nama Perusahaan yang Disorot soal Karhutla Papua, Siapa Saja?

Oleh Van · 11 Nov, 17.42 WIB

JAKARTA — Tiga perusahaan terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menelusuri sejumlah titik api. Identitas perusahaan tersebut telah dikantongi, tetapi belum diumumkan kepada publik.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan data ketiga perusahaan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan.

"Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah," kata Kristomei dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

BNPB Telusuri Tiga Perusahaan Terkait Karhutla Papua

Kristomei menjelaskan, identifikasi bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot menggunakan aplikasi BNPB. Penelusuran kemudian dilakukan untuk mengetahui lokasi titik api dan perusahaan yang berada di sekitarnya.

BNPB belum memastikan apakah kebakaran tersebut berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui penyebab munculnya api di lokasi-lokasi tersebut.

Surat permintaan klarifikasi dan verifikasi telah dikirimkan kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengecek kondisi di lapangan.

WALHI Catat 65 Titik Api di Konsesi 11 Perusahaan

Temuan BNPB tersebut menjadi sorotan di tengah data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengenai sebaran titik api di Papua Selatan. Dalam kajiannya, WALHI mencatat 65 titik api berada di dalam konsesi 11 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Tiga perusahaan dengan jumlah titik panas terbanyak dalam catatan tersebut adalah PT Plasma Nutfah Marind Papua dan PT Selaras Inti Semesta, masing-masing 17 titik, serta PT Wanatirta Ediwibowo dengan 12 titik.

Selain itu, WALHI mencatat titik panas di konsesi PT Tunas Sawaerma sebanyak tujuh titik, PT Damai Setiatama Tbr dan PT Sagindo Sari Lestari II masing-masing tiga titik, serta PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II sebanyak dua titik.

Empat perusahaan lainnya masing-masing tercatat memiliki satu titik panas, yakni PT Artika Optima Inti Unit IV, PT Bade Makmur Orissa, PT Merauke Rayon Jaya, dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III.

Perlu dicatat, daftar perusahaan dalam kajian WALHI tersebut tidak otomatis sama dengan tiga perusahaan yang sedang diverifikasi BNPB. BNPB belum membuka identitas tiga perusahaan yang dimaksud, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Presiden Batal ke UTU, Aceh Barat Titip Tiga Harapan

Oleh Biro Meulaboh · 11 Nov, 15.58 WIB



Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda menghadiri Dies Natalis UTU sekaligus menggelar zikir dan doa bersama meski kunjungan Presiden Prabowo ke kampus tersebut ditunda,FOTO/ist

MEULABOH – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) belum mencakup agenda ke Universitas Teuku Umar (UTU), Aceh Barat. Agenda tersebut ditunda akibat perubahan jadwal perjalanan Presiden yang cukup padat.

Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dari Menteri Dalam Negeri, Presiden Prabowo mendarat di Bandara Cut Nyak Dhien sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Presiden langsung menuju Sekolah Rakyat dan Masjid Giok di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.

Perubahan jadwal keberangkatan dari rencana semula pukul 06.00 WIB di Bandara Halim, Jakarta, menyebabkan waktu kunjungan menjadi terbatas. Jika perjalanan dilanjutkan ke Kampus UTU, Presiden diperkirakan baru kembali ke Jakarta pada malam hari, sementara masih terdapat agenda kenegaraan lainnya yang tidak dapat dibatalkan.

Upaya menggunakan helikopter dari Alun-Alun Nagan Raya menuju UTU juga terkendala kondisi lokasi pendaratan. Helipad di Lapangan Korem Teuku Umar dilaporkan belum memungkinkan digunakan karena kondisi tanah yang labil dan berair. Sementara itu, perjalanan melalui jalur darat dinilai tidak memungkinkan karena jarak tempuh yang cukup jauh.

Meski Presiden belum dapat menghadiri agenda di Kampus UTU, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jika Gibran Jatuh, Proses Hukum Dugaan Penipuan Dokumen Sekolah Harus Tetap Berjalan

Oleh Redaksi · 12 Nov, 07.48 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso menegaskan bahwa proses hukum terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan SMA atau sederajat harus tetap berjalan, terlepas dari perkembangan Politik yang terjadi saat ini.Menurut Jayadi, kemungkinan Gibran kehilangan jabatan atau jatuh dari posisi Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum. Persoalan hukum dan persoalan politik merupakan dua hal berbeda yang harus ditangani melalui mekanisme masing-masing.

“Jika Gibran jatuh, proses hukum dugaan penipuan dokumen sekolah harus tetap berjalan. Jangan sampai persoalan hukum berhenti hanya karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden,” tegas Jayadi Santoso, Rabu (11/11/2026).

Ia menilai, jabatan politik tidak boleh menjadi tameng bagi siapa pun untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Setiap warga negara, termasuk pejabat tinggi negara, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Jayadi juga mengingatkan bahwa polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran telah menjadi perhatian publik. Karena itu, dugaan persoalan tersebut perlu mendapatkan kejelasan melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti.

Menurut dia, apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam penggunaan atau penerbitan dokumen pendidikan, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Penanganannya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun perubahan kekuasaan.

“Jangan mencampuradukkan persoalan pemakzulan atau jatuhnya Gibran dengan proses pidana. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, ya harus diperiksa dan dibuktikan. Proses hukum tidak boleh berhenti,” ujarnya.

Jayadi menegaskan, pergantian atau berakhirnya jabatan seseorang tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Apabila ditemukan unsur tindak pidana dan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak bersikap tebang pilih dalam menangani perkara yang melibatkan tokoh politik maupun pejabat negara. Independensi kepolisian dan kejaksaan menjadi penting agar masyarakat tidak memiliki kesan bahwa hukum hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki kekuasaan.

Bagi Jayadi, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nasib politik Gibran, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai dugaan persoalan dokumen pendidikan tersebut melalui mekanisme hukum yang sah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Polri Tak Hanya Selidiki Penyadapan Presiden Prabowo, tapi juga Dugaan Makar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 09.35 WIB



BANDA ACEH - Mabes Polri mengembangkan penanganan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki kasus dugaan makar berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap hal itu saat berbicara di Komisi III DPR pada Kamis (12/11).

Dia menyatakan bahwa selain penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri telah menerbitkan laporan polisi atas dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

”Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau ada tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” terang Suyudi.

Saat ini, lanjut Suyudi, dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Semua perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

”Karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” imbuhnya.

Untuk mendalami dugaan tersebut, Suyudi memastikan bahwa penyelidikan saat ini fokus pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan.

Juga pemeriksaan personel yang diduga mengetahui tindakan pelanggaran hukum tersebut, serta pendalaman tugas dan tindakan itu.

Sejauh ini, Polri sudah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses.

Yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Satu per satu di antara para jenderal itu juga diproses etik, bahkan Ahrie Sonta kini sudah dipecat dari kepolisian.

Pada Selasa (10/11), Polri melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dengan terduga pelanggar Ahrie Sonta.

Ahrie diputus melanggar aturan dan diberi sanksi pemecatan secara tidak hormat atau PTDH dari Polri, namun ia mengajukan banding

ACEH

Wagub Aceh Dampingi Prabowo Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat di Nagan Raya

Oleh Redaksi · 11 Nov, 15.34 WIB

NAGAN RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Prabowo tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Kabupaten Nagan Raya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Masjid Agung Baitul A’la atau yang dikenal dengan Masjid Giok, di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Dalam perjalanan dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju lokasi kegiatan, Prabowo melintas langsung di samping bentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer yang dibentangkan oleh masyarakat setempat. Pembentangan bendera tersebut menjadi pemandangan istimewa sekaligus wujud semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Nagan Raya terhadap Tanah Air.

Aksi pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer itu juga mencatatkan prestasi dengan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Setibanya di lokasi, Prabowo melanjutkan agenda dengan meresmikan Masjid Giok Baitul A’la serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nagan Raya.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih baik, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Sementara itu, peresmian Masjid Giok Baitul A’la menjadi momentum penting dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.

Kunjungan kerja Presiden tersebut turut didampingi sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Kehadiran Wagub Aceh dalam kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap program dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di Aceh.[]

LINGKUNGAN

Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027

Oleh Redaksi · 11 Nov, 17.35 WIB

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Kebijakan itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Melalui penetapan status tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.

Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana,
kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait juga …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prabowo dengan Berat Hati Terima Keputusan Gibran Resign

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.08 WIB



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. FOTO/Net.

BANDA ACEH-Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima dengan berat hati keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore, 12 November 2026.

Gibran disebut telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri secara langsung kepadanya sebelum mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," sambungnya.

Prabowo menilai keputusan Gibran menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, dan negarawan. Dia mengapresiasi kontribusi Gibran selama mendampinginya, baik sejak masa kampanye maupun dalam dua tahun pemerintahan.

Sejak awal menjabat, Prabowo telah memberikan tugas kepada Gibran untuk turun langsung ke daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memastikan program-program pemerintah berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Prabowo, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota serta meninjau 303 titik proyek pemerintah selama dua tahun.

"Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah. Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya," tuturnya.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme konstitusi. MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memperoleh wakil presiden definitif pengganti Gibran.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR RI yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB dengan agenda tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran dibatalkan

NASIONAL

Komisi III DPR Desak Polri Terapkan Pasal Makar dan Pidana Mati Listyo Sigit CS

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.07 WIB



BANDA ACEH -Komisi III DPR RI meminta Polri menindak tegas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk dengan menerapkan pasal makar dan ancaman pidana mati.

Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri telah menyandang status tersangka.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Safaruddin menegaskan, penindakan harus dimulai dari pimpinan atau pihak yang berada di posisi komando.

Ia juga meminta agar pimpinan yang dimaksud lebih dahulu menjalani sidang etik.

"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik," ujar Safaruddin.

Selain proses etik, Safaruddin meminta penyidik menerapkan Pasal 191 KUHP terkait makar.

Legislator PDIP itu bahkan mendesak agar empat orang yang dimaksud dalam perkara tersebut dijatuhi pidana mati.

"Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati," tegasnya.

Safaruddin pun meyakini bahwa Jenderal Suyudi dan jajaran akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Oke pak? Bapak kuat? Oke kita kuat. Kebenaran mungkin akan terpinggirkan, tapi kebenaran tidak akan pernah kalah. Saya tahu bapak, pak kapolri ini akan agamanya kuat. Insyaallah kita akan memperjuangkan semua nanti di akhirat. Kalau kita mati, dalam menegakkan aturan-aturan yang ada ini, kebakaran kita itulah yang cari semua. Kita akan mati syahid," pungkasnya.

NASIONAL

Gibran Tak Sampaikan Alasan Pengunduran Diri ke MPR

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.13 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya saat menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pertemuan yang berlangsung sekitar 20 menit itu hanya membahas penyampaian surat pengunduran diri Gibran dan permintaan agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

"Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis, 12 November 2026.

Saat ditanya apakah Gibran mencantumkan alasan pengunduran diri dalam surat tersebut, Muzani menjawab singkat, "Tidak."

Namun, Muzani mengaku belum membuka isi surat yang diserahkan Gibran. Ia mengatakan, surat tersebut akan dibuka bersama pimpinan MPR lainnya.

"Eh, kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," ujarnya.

Muzani menjelaskan, surat pengunduran diri yang sama juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

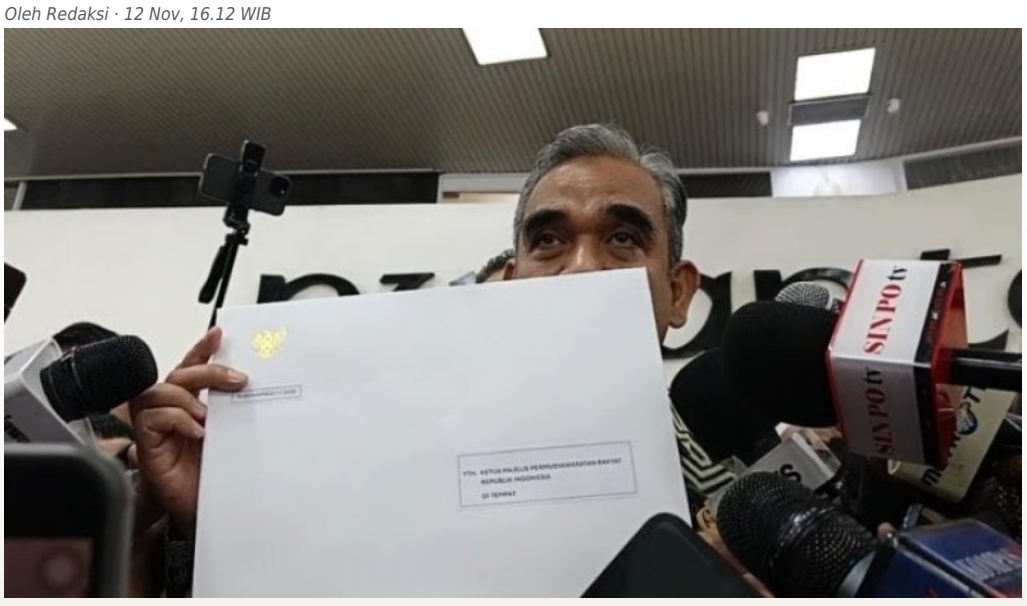
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya. MPR selanjutnya akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut Muzani, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden.

NASIONAL

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Gibran untuk MPR

Oleh Redaksi · 12 Nov, 16.12 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden RI ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatannya atas permintaan sendiri dengan alasan demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam surat pengunduran diri yang diserahkan kepada pimpinan MPR, Gibran menegaskan kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat tersebut setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada pukul 11.26 WIB.

"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," demikian isi surat yang dibacakan Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 12 November 2026.

Dalam surat tersebut, Gibran juga menyampaikan alasan umum di balik keputusannya. Namun, tidak ada penjelasan spesifik mengenai alasan pengunduran diri yang dicantumkan dalam surat itu.

"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," lanjut isi surat tersebut.

Muzani menegaskan, surat yang diserahkan Gibran tidak menyebutkan alasan lebih lanjut mengenai keputusan mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen, Gibran terlihat menunjukkan ekspresi sedih saat berpamitan dengan pimpinan dan anggota MPR. Ia memeluk satu per satu mereka yang mengantarkannya menuju mobil, termasuk Anggota MPR Andre Rosiade.

Usai berpamitan, Gibran langsung menaiki Toyota Innova Zenix tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Mobilnya kemudian meninggalkan lokasi dengan pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

NASIONAL

Jokowinisti: Gibran Mirip Gus Dur, Akan Dikenang sebagai Guru Bangsa

Oleh Redaksi · 12 Nov, 07.53 WIB



BANDA ACEH - Koordinator Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menilai Gibran Rakabuming Raka memiliki kemiripan dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya dinilai memiliki pengalaman Politik yang samasama berujung pada penjatuhan dari jabatan tertinggi dalam pemerintahan.Menurut Nurhadianto, Gus Dur pernah dijatuhkan dari kursi Presiden Republik Indonesia, sedangkan Gibran kini menghadapi situasi politik yang mengarah pada penjatuhan dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Ia berpandangan, penjatuhan terhadap kedua tokoh tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik di lingkaran kekuasaan. Ada kepentingan dan konfigurasi politik yang turut menentukan nasib seseorang dalam jabatan kenegaraan.

"Gibran mempunyai kemiripan dengan Gus Dur. Gus Dur dijatuhkan dari kursi Presiden, sementara Gibran dijatuhkan dari kursi Wakil Presiden. Penjatuhan ini lebih bersifat politis," kata Nurhadianto kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ia mengatakan, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa jabatan tinggi tidak selalu menjadi jaminan seseorang dapat menyelesaikan masa tugasnya. Dinamika politik, tarik-menarik kepentingan, serta perubahan dukungan dapat memengaruhi keberlangsungan kekuasaan.

Nurhadianto juga menilai, peristiwa politik yang sedang dihadapi Gibran perlu dilihat dari perspektif sejarah. Menurut dia, penilaian terhadap seorang pemimpin tidak semestinya berhenti pada keberhasilan atau kegagalannya mempertahankan jabatan.

"Gus Dur sudah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Meskipun dijatuhkan dari jabatan Presiden, pemikiran dan perjuangannya tetap dikenang masyarakat," ujarnya.

Dalam pandangan Nurhadianto, Gibran juga berpeluang dikenang dalam sejarah politik Indonesia. Bahkan, ia menyampaikan keyakinan bahwa Gibran kelak akan dikenang sebagai guru bangsa, meskipun perjalanan politiknya di pemerintahan diwarnai kontroversi dan konflik.

Ia menambahkan, sejarah sering kali memberikan penilaian berbeda dibandingkan penilaian politik yang berkembang ketika suatu peristiwa sedang berlangsung. Tokoh yang pernah mengalami tekanan dan penjatuhan politik bisa saja mendapatkan tempat tersendiri dalam ingatan masyarakat.

Karena itu, Nurhadianto meminta publik melihat persoalan Gibran tidak hanya dari sudut pandang perebutan jabatan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, waktu yang akan membuktikan bagaimana sejarah mencatat Gibran, sebagaimana Gus Dur tetap dikenang meskipun pernah dijatuhkan dari kursi kepresidenan.

NASIONAL

Partai Pendukung Jangan Merecoki Pilihan Prabowo Jika Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 12 Nov, 09.39 WIB



BANDA ACEH -Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menarik untuk disimak apabila kabar pengunduran dirinya benar-benar terealisasi.

Namun, siapa pun sosok yang nantinya dipilih menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto, seluruh partai pendukung diminta menghormati keputusan kepala negara.

Politikus Partai Demokrat Andi Arief berharap Prabowo dapat semakin kuat dan sukses menjalankan kepemimpinannya. Karena itu, urusan penentuan wakil presiden pengganti Gibran sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Kita harapkan Pak Prabowo semakin kuat dan bisa sukses memimpin. Soal siapa Wapres pengganti Gibran, serahkan semua pada Pak Prabowo. Partai pendukung harus mendukung apa yang dipilih nanti-jangan merecoki pilihan Presiden," kata Andi Arief, Kamis, 12 November 2026.

Ia menegaskan, dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo harus menjadi perhatian utama partai-partai pendukung pemerintah.

"Sekali lagi, doa terbaik kita: 'Pak Prabowo sukses'," sambungnya.

Sementara itu, dinamika Politik terkait posisi Gibran juga berkembang di parlemen. Sebelumnya, delapan fraksi DPR RI telah resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI.

Delapan fraksi tersebut terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Berdasarkan data pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul Demokrat sebanyak 19 orang, NasDem dan PKB masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.

Dengan demikian, total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan usulan HMP pemakzulan Gibran.

Perkembangan tersebut membuat dinamika posisi wakil presiden menjadi perhatian, baik terkait kelanjutan proses politik di DPR maupun kemungkinan munculnya nama-nama pengganti apabila Gibran benar-benar mundur.

NASIONAL

Kata-kata Gibran Saat Peluk Prabowo: Saya Minta Maaf Ya Pak

Oleh Redaksi · 12 Nov, 17.29 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka setelah menyatakan menerima pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden. Gibran menyampaikan permintaan maaf ke Prabowo.Momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Prabowo dan Gibran awalnya bersalaman.

Gibran tampak mencium tangan Prabowo. Prabowo kemudian memeluk Gibran.

"Saya minta maaf, ya, Pak," ujar Gibran.

Prabowo kemudian menepuk-nepuk pundak Gibran. Setelah itu, Gibran tampak bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Gibran juga berpelukan dengan Dasco.

Sebelumnya, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan wapres. Gibran menyerahkan surat ke Prabowo dan MPR.

MPR kemudian menindaklanjuti surat itu. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan jabatan wapres kosong mulai hari ini.

Dia mengatakan MPR akan meminta Prabowo mengirimkan dua nama calon wakil presiden. MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi jabatan wapres.

NASIONAL

Gibran Resign dari Wapres, Rapat Paripurna DPR Batal!

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.19 WIB



BANDA ACEH -Gibran Rakabuming Raka telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari ini, Kamis, 12 November 2026.

Berkenaan dengan itu, Rapat Paripurna DPR RI yang telah dijadwalkan pukul 14.00 WIB siang ini dengan agenda tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran dibatalkan.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," demikian keterangan rezeki Kesekjenan DPR RI.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Hari ini, Muzani bersama para pimpinan MPR dan kelompok DPD akan menggelar rapat pimpinan (Rapim).

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," kata Muzani

NASIONAL

Gibran Dikabarkan Mundur Sebagai Wapres, Polemik Ijazah Dianggap Selesai

Oleh Redaksi · 12 Nov, 08.21 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella menilai, kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden akan mengakhiri polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.

Rio menyikapi kabar pengunduran Gibran secara positif. Langkah ini juga bisa menurunkan tensi ketegangan Politik yang terjadi di parlemen.

Baginya, Gibran mengutamakan kepentingan publik dengan langkah mundur tersebut. Sebab, jika tidak mundur bisa terjadi pemakzulan di DPR RI.

"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," ujar Rio, Rabu (11/11).

Melalui momentum ini, Hanura mengajak kepada seluruh elite politik agar mengakhiri berbagai konflik yang terjadi. Semua pihak harus kembali bersatu demi memajukan bangsa.

"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," imbuhnya.

Soal dinamika di parlemen, Rio menilai, proses politik hak menyatakan pendapat di DPR, tak lagi relevan untuk dilanjutkan. Sebab, subjek hukum yang dipersoalkan telah melepaskan jabatannya.

"Proses politik di DPR sudah selesai," tegasnya.

Selanjutnya Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memproses pengganti Gibran sesuai koridor konstitusi. Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Rio meyakini proses pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cepat, karena stabilitas politik di parlemen cukup kondusif dan pucuk pimpinan MPR saat ini dijabat oleh kader Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," pungkasnya

NASIONAL

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Rakabuming Raka Jelas

Oleh Redaksi · 12 Nov, 08.28 WIB



BANDA ACEH -Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta merta membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghentikan langkah politiknya.

PKS menegaskan tetap akan memperjuangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran hingga ada kejelasan mengenai status orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan, proses pengajuan HMP akan terus berjalan di DPR sampai kepastian mengenai kabar pengunduran diri Gibran terkonfirmasi.

"HMP akan terus bergulir di Paripurna pagi ini, sampai jelas statusnya Gibran mundur atau dimundurkan," kata Mardani lewat akun X miliknya, Kamis, 12 November 2026.

Sikap PKS ini muncul di tengah kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR RI berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, delapan fraksi di DPR RI telah resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI.

Delapan fraksi yang mengajukan usulan tersebut yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Berdasarkan data pengusul, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Disusul Fraksi Demokrat sebanyak 19 orang, NasDem dan PKB masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.

Dengan demikian, total anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan HMP mencapai 120 orang.

Perkembangan ini membuat nasib Politik Gibran berada dalam dua sorotan, yakni kepastian kabar pengunduran dirinya dan kelanjutan proses politik di DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat.

NASIONAL

Wapres Gibran Akhirnya Tiba di MPR, Bawa Map Putih Tanpa Pengawalan Ketat

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.11 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya tiba di gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 12 November 2026. Pantauan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Gibran tiba Lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam berdasi merah. Sementara itu, di tangan kirinya, Gibran menenteng berkas-berkas sambil berjalan menuju ruangan pimpinan DPR/MPR/DPD.

Dari arah parkiran mobil, Wapres Gibran terlihat berjalan sendiri. Hanya ada beberapa pengawal berbaju putih yang menyusul dari belakang. Tidak terlihat ada pengawalan ketat untuk Wapres ke14 RI ini.

Barulah penjagaan berubah saat Gibran masuk ke Gedung Nusantara III. Di tengah gempuran pertanyaan dari puluhan awak media, sejumlah petugas pengamanan mulai memagari jalur lintas Wapres.

Sementara Gibran tidak menyampaikan sepatah katapun kepada awak media yang memberondong sejumlah pertanyaan.

Kedatangan Gibran ini sebelumnya telah dikonfirmasi Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Namun tidak dijelaskan maksud kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini meski beredar kabar akan menyampaikan surat pengunduran diri.

“Hari ini Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar,” kata Muzani.

NASIONAL

Kapolri Ungkap Target Penyadapan Listyo Sigit Cs: Presiden, Kejaksaan, KPK hingga Gubernur

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.09 WIB



BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.

Adapun target penyadapan terdiri atas berbagai elemen yakni, Presiden, Kementerian/Lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan hingga tokoh masyarakat lainnya.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai Politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.

Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Untuk itu, target sadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.

Lebih lanjut, Suyudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli di tahap penyidikan.

"Dari 28 saksi terdiri atas 24 personel internal Polri, 3 saksi dari provider telekomunikasi yaitu Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta 1 saksi dari vendor sistem penyadapan. Sementara itu, 6 ahli terdiri dari 2 ahli ITE dan 4 ahli pidana," tuturnya.

Adapun, barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan

NASIONAL

Rapat Bareng Kapolri, Komisi III DPR Minta Semua Fakta Kasus Penyadapan Prabowo Dibuka

Oleh Redaksi · 12 Nov, 09.43 WIB



BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Sedianya, rapat ini akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Suyudi membuka seluruh fakta kasus tersebut. Dia juga mendesak Polri mengusut dugaan rangkaian tindakan ilegal mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lain yang menurutnya saling berkaitan.

“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” ujar Habiburokhman.

Menurutnya, dugaan tindakan kelompok tersebut tidak hanya menyangkut penyadapan ilegal. Dia menyebut adanya informasi mengenai sejumlah kegiatan lain yang perlu didalami kepolisian.

Kegiatan yang dimaksud antara lain dugaan pengawasan ilegal (illegal surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.

Habiburokhman menilai, rangkaian tindakan tersebut, apabila terbukti, berpotensi mengganggu kemampuan Presiden dalam menjalankan tugasnya.

“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” kata dia.

Habiburokhman menekankan perlunya pendalaman sebelum tindakan yang dituduhkan dapat dinyatakan terbukti.

Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Sedianya, Suyudi turut didampingi oleh Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat hingga Irwasum Komjen Asep Edi Suheri

NASIONAL

Pimpinan MPR Mulai Berdatangan di Tengah Kabar Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.06 WIB



BANDA ACEH - Sejumlah pimpinan MPR mulai berdatangan ke Gedung Nusantara III, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026) pagi. Hal ini menyusul adanya kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden (Wapres) kepada MPR.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terlihat datang lebih awal.

Tak berselang lama, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai NasDem, Lestari Moerdijat juga telah hadir. Sayangnya, keduanya tak memberikan komentar ihwal agenda pada pagi ini.

Beberapa menit kemudian, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir datang di waktu yang bersama dengan Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Awalnya, keduanya juga tidak memberikan komentar ihwal kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wapres. Sampai akhirnya, Bambang Pacul meminta awak media untuk bersabar menunggu kabar tersebut.

“Sudah, sudah, kau tunggu sebentar lagi,” ucap Bambang Pacul.

Saat dikonfirmasi apakah Gibran akan datang sekira pukul 11.00 WIB, Bambang Pacul tak menjawab secara lugas.

“Nanti, nanti,” katanya langsung menuju lift Gedung Nusantara III

NASIONAL

Siang Ini, Gibran Dikabarkan Bakal ke MPR Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Wapres

Oleh Redaksi · 12 Nov, 10.52 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mendatangi Gedung MPR RI pada Kamis siang, 12 November 2026, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di sela-sela rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Habiburokhman awalnya mempersilakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, untuk berbicara lebih dahulu dalam raker bersama Kapolri Jenderal Suyudi lantaran memiliki agenda di MPR.

"Berikutnya, tokoh kita, Benny Kabur Harman, karena beliau ada acara MPR, dipersilakan bicara duluan. Jam 11.00 WIB Gibran menyerahkan surat pengunduran diri," ungkap Habiburokhman yang langsung disambut tawa peserta rapat.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat mempersilakan Benny K. Harman berbicara dalam rapat tersebut.

“Dipersilahkan Pak Benny,” kata Legislator Gerindra ini.

Sekadar informasi, agenda utama pada raker Komisi IIi DPR dengan Kapolri kali ini yakni membahas penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

ACEH

3 BERITA

ACEH

The Pade Hotel Dukung Pelantikan SMSI Aceh Besar, Media Berperan Promosikan Daerah

Oleh Redaksi · 12 Nov, 20.01 WIB



BANDA ACEH, ACEH BESAR – Manajemen The Pade Hotel Aceh Besar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelantikan Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029 yang dirangkai dengan kegiatan SMSI Aceh Besar Awards 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, di The Pade Hotel, Aceh Besar.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh General Manager (GM) The Pade Hotel Aceh Besar, Reckyanto Mella, Kamis (12/11/2026). Ia menyambut positif kehadiran SMSI di Aceh Besar dan berharap organisasi perusahaan media siber tersebut dapat menjadi mitra strategis dalam mempromosikan potensi daerah.

Menurut Reckyanto, media memiliki peran yang sangat penting dalam membangun citra positif suatu daerah melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan konstruktif. Publikasi yang luas mengenai potensi wisata, budaya, kuliner, hingga fasilitas perhotelan diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Aceh Besar bagi masyarakat luar daerah.

"Peran media siber sangat penting dalam menyebarluaskan informasi positif tentang Aceh Besar. Kami berharap melalui pemberitaan dan publikasi yang baik, semakin banyak masyarakat dari luar daerah tertarik untuk datang dan berkunjung ke Aceh," ujarnya.

Ia menegaskan, The Pade Hotel siap mendukung kegiatan SMSI Aceh Besar serta membuka ruang kolaborasi dan kerja sama berkelanjutan, terutama dalam bidang promosi pariwisata dan perhotelan.

Reckyanto berharap sinergi antara SMSI dan pelaku usaha dapat terus diperkuat sehingga memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sektor pariwisata, dunia usaha, dan pembangunan ekonomi Aceh Besar.

Sementara itu, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen The Pade Hotel atas sambutan serta dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan pelantikan pengurus dan SMSI Aceh Besar Awards 2026.

Menurutnya, dukungan dari dunia usaha merupakan bagian penting dalam membangun kemitraan yang produktif antara insan pers, perusahaan media, dan berbagai elemen pembangunan daerah.

"Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada manajemen The Pade Hotel yang telah menyambut baik serta mendukung kegiatan SMSI Aceh Besar. Ini menjadi langkah positif dalam membangun kemitraan antara media dan dunia usaha," kata Zulfikar.

Ia menambahkan, SMSI Aceh Besar siap membangun kerja sama dengan The Pade Hotel, khususnya dalam membantu memperluas jangkauan promosi melalui jaringan perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Pimpin Upacara HKN ke-62, Sejumlah Kabupaten dan Kader Kesehatan Raih Penghargaan

Oleh Redaksi · 12 Nov, 14.47 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Aceh, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan amanat Menteri Kesehatan (Menkes) RI yang menekankan pentingnya transformasi kesehatan nasional dengan mengutamakan pencegahan penyakit dan menjaga masyarakat tetap sehat, bukan sekadar mengobati ketika sakit.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Program ini juga mendeteksi lebih dari delapan juta warga yang mengalami hipertensi atau diabetes, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit, termasuk Tuberkulosis (TB), melalui peningkatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, penguatan rumah sakit rujukan, serta perluasan jaminan kesehatan.

Menkes menyampaikan, keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas dan jumlah masyarakat yang diperiksa, tetapi dari semakin banyaknya masyarakat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

"Keberhasilan transformasi kesehatan bukan sekadar diukur dari fasilitas yang dibangun atau masyarakat yang diperiksa, melainkan dari semakin banyaknya rakyat yang hidup sehat, produktif, dan berkualitas," demikian kutipan amanat Menkes yang dibacakan Taufik.

Sejumlah Kabupaten dan Kader Terima Penghargaan

Pada rangkaian peringatan HKN ke-62 tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada sejumlah kader Posyandu, Puskesmas, serta pemerintah kabupaten/kota di Aceh atas capaian di bidang kesehatan.

Untuk kategori Posyandu Berprestasi, penghargaan diberikan kepada Anniyah dari Puskesmas Jangka, Gampong Alue U, Kabupaten Bireuen. Sementara penghargaan Kader Posyandu Berprestasi diberikan kepada Nursaimah dari Gampong Meuse, Kabupaten Bireuen.

Adapun penerima penghargaan lainnya berdasarkan kategori, yaitu:

1. Cakupan yang Dilayani CKG
• Terbaik I: Dinas Kesehatan Kota Langsa
• Terbaik II: Dinas Kesehatan Kota Sabang
• Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

2. Penemuan Kasus TBC Tertinggi
• Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya
• Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan
• Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Tertinggi
• Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
• Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar
• Terbaik III: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

4. Investigasi Kontak Kasus TBC Tertinggi
• Terbaik I: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
• Terbaik II: Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Prabowo Klaim Pemulihan Bencana Sumatra Hampir Tuntas

Oleh Syarifudin Brutu · 12 Nov, 02.18 WIB



Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan arahan dalam kegiatan peresmian Masjid Giok Baitul 'Ala di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026). (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).

NAGAN RAYA – Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih sepenuhnya. Meski demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menuntaskan pemulihan di sejumlah daerah yang belum sepenuhnya kembali normal.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika meresmikan Masjid Giok Baitul 'Ala di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu, 11 November 2026. Ia menyebut proses pemulihan yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir telah menunjukkan perkembangan signifikan.

"Alhamdulillah sudah dalam beberapa bulan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah banyak daerah yang sudah pulih, ya, 100 persen, ada yang masih sisa beberapa persen," kata Prabowo dalam sambutannya.

Kendati sebagian wilayah diklaim telah mencapai pemulihan penuh, Presiden menegaskan pemerintah belum akan menghentikan upaya rehabilitasi di kawasan yang masih membutuhkan penanganan. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan iklim global menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui kesiapan nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah tengah menyiapkan langkah berskala besar untuk menghadapi berbagai kemungkinan dampak perubahan iklim. Seluruh kemampuan negara, katanya, akan dikerahkan untuk menghadapi tantangan tersebut.

"Kita bekerja keras, kita harus siap. Iklim dunia sedang banyak perubahan, kita antisipasi, tapi kita akan kerahkan segala kemampuan kita untuk menghadapinya. Kita sedang menyiapkan persiapan besar-besaran," ujarnya.

Namun, pernyataan mengenai pemulihan tersebut muncul di tengah masih berlangsungnya pekerjaan rehabilitasi dan penanganan risiko bencana di Sumatra. Sehari sebelum kunjungan Presiden ke Nagan Raya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa sedikitnya 41 kejadian banjir susulan tercatat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama April hingga Oktober 2026.

Data yang disampaikan dalam evaluasi pemerintah pada 9 November 2026 itu juga mencatat sebanyak 137 sungai terdampak. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memprioritaskan percepatan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir berikutnya.

Persoalan infrastruktur pertanian turut menjadi perhatian Presiden dalam kunjungan tersebut. Prabowo menyebut Nagan Raya sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di kawasan Sumatera bagian utara. Karena itu, ia meminta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan segera diperbaiki.

Presiden mengaku telah menerima laporan mengenai kebutuhan pembenahan saluran irigasi di kabupaten tersebut. Ia pun menyatakan telah memberikan instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo agar segera menindaklanjutinya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

3 BERITA

EDUKASI

FEBI UIN Ar-Raniry Bekali Mahasiswa KPM dengan Aplikasi SIGAP

Oleh FEBI · 12 Nov, 17.50 WIB



Semangat kolaborasi mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam kegiatan LP2M. FOTO/Dok. FEBI UIN Ar-Raniry.

BANDA ACEH – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh membekali mahasiswa peserta Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) SIGAP dengan pelatihan penggunaan Aplikasi SIGAP di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam mengelola data dan mendukung pemberdayaan masyarakat gampong selama pelaksanaan pengabdian.

Dekan FEBI UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M., mengatakan bahwa KPM merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Menurutnya, mahasiswa harus menjadikan KPM sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik.

Mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan gagasan, membangun kolaborasi, serta menjaga integritas dan nama baik almamater selama berada di tengah masyarakat.

Pembekalan Teknis dan Administrasi KPM

Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry, Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag., menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan peserta agar mampu berkomunikasi dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan, serta menjalankan program pengabdian secara bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, Wardinal dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry menyampaikan materi mengenai teknis dan administrasi pelaksanaan KPM.

Materi mencakup mekanisme pengumpulan tugas melalui Google Classroom, format penulisan, serta ketentuan administrasi yang harus dipenuhi mahasiswa.

DPMG Aceh Perkenalkan Penggunaan Aplikasi SIGAP

Materi selanjutnya disampaikan Kepala Bidang PKSDA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Wardana, M.Si.

Ia menjelaskan fungsi dan pemanfaatan Aplikasi SIGAP dalam mendukung pengelolaan data serta informasi gampong.

Penjelasan teknis dilanjutkan oleh Qamara Anggini, S.Kom., staf DPMG Aceh, bersama Isnan Bajili.

Keduanya memberikan panduan mengenai pengoperasian aplikasi, termasuk tata cara pengisian dan penginputan data sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pembekalan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Aplikasi SIGAP sehingga dapat mendukung pelaksanaan KPM secara lebih terarah.

FEBI UIN Ar-Raniry berharap kegiatan ini dapat menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan digital dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, pelaksanaan KPM diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan gampong.

EDUKASI

Bantu Pelajar Difabel Rancang Masa Depan, ABC Indonesia Gelar Program Mentorship

Oleh Van · 12 Nov, 17.37 WIB



Momen seru saat acara kebersamaan karyawan di kantor dengan suasana hangat.

JAKARTA — Sebanyak 10 pelajar disabilitas menyelesaikan program INSPIRE Mentorship yang digelar PT Heinz ABC Indonesia bersama Yayasan Helping Hands (YHH).

Program pendampingan selama tiga bulan ini membantu siswa SMA difabel mempersiapkan masa depan setelah lulus sekolah.

"Anak-anak Indonesia memiliki potensi terbaik yang perlu kita jaga dan kembangkan," ujar People & Performance Director PT Heinz ABC Indonesia, Dina Sitopu.

Dina menyebut program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberagaman dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam program ini, karyawan ABC Indonesia berperan sebagai mentor untuk mendampingi siswa mengenali potensi dan merencanakan langkah berikutnya.

Akses Pendidikan Masih Menjadi Tantangan

Kebutuhan pendampingan tersebut tergambar dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Statistik Pendidikan 2024.

Sebanyak 22,17 persen penyandang disabilitas tercatat menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Hanya 5,58 persen yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Direktur Yayasan Helping Hands, Wendy Kusumowidagdo, mengatakan program ini hadir untuk menjawab minimnya akses anak difabel terhadap dunia profesional.

Ia mengapresiasi kolaborasi dengan ABC Indonesia karena memberikan pengalaman praktis bagi peserta. "Kontribusi nyata dalam membagikan pengetahuan serta pengalaman praktis" dinilai penting untuk membangun kepercayaan diri mereka.

Mentor dan Siswa Sama-Sama Belajar

Salah satu pasangan dalam program ini adalah Baiq Rahmi, karyawan ABC Indonesia, yang mendampingi Aqsyal Rusli dari SLB Pembina Tingkat Nasional.

Aqsyal berencana melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Pendidikan Luar Biasa. Pendampingan tersebut membantunya mempersiapkan rencana studi.

Baiq mengaku mendapat pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pelajar disabilitas. "Saya dapat memahami lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi pelajar disabilitas," ujarnya.

Aqsyal juga merasakan manfaat dari sesi pendampingan tersebut. "Pendampingan ini menambah kepercayaan diri saya," katanya.

Yayasan Helping Hands sendiri menjalankan tiga pilar program, yakni mentoring satu lawan satu, peningkatan keterampilan teknologi dan digital, serta program magang.

Sejak berdiri pada 2021, jejaring pendampingan YHH telah menjangkau sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas siswa difabel dan mentor. Melalui kolaborasi ini, ABC Indonesia dan YHH berharap semakin banyak anak disabilitas memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dan merancang masa depannya.(*)

EDUKASI

DWP Aceh Barat Gelar Edukasi dan Lomba Olahan Daun Kelor

Oleh Biro Meulaboh · 12 Nov, 15.55 WIB



Penandatanganan kerja sama dalam acara Kelorpreneur Challenge untuk mendorong kesehatan keluarga dan pemberdayaan perempuan,FOTO/ist

MEULABOH– Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr Kurdi ST, MT, MH, mewakili Bupati Aceh Barat membuka kegiatan edukasi dan kompetisi kudapan berbahan daun kelor yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Barat di Kafe Seulawah, Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (12/11/26).

Kegiatan bertema "Satu Daun Dua Kekuatan: Keluarga Sehat, Perempuan Berdaya" tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota DWP dalam mengolah potensi pangan lokal menjadi produk bernilai tambah.

Dalam sambutannya, Kurdi mengatakan daun kelor merupakan salah satu bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan memiliki kandungan gizi baik. Namun, pemanfaatannya perlu didukung pengetahuan serta inovasi agar dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana edukasi dan peningkatan kapasitas perempuan dalam mengembangkan kreativitas.

Ia mendorong anggota DWP untuk berinovasi dengan memperhatikan kualitas, cita rasa, tampilan, hingga kemasan produk agar memiliki daya tarik dan nilai jual.

"Jangan hanya terpaku pada cara pengolahan yang biasa dilakukan. Ciptakan variasi baru sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi," ujar Kurdi.

Sementara itu, Ketua DWP Aceh Barat, Cut Zulfahnur Syafitri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang ekonomi, khususnya pemberdayaan melalui pengolahan daun kelor.

Kegiatan ini diikuti 37 DWP organisasi perangkat daerah (OPD). Pelaksanaannya terdiri atas dua tahapan, yakni edukasi dengan menghadirkan tiga narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis, dilanjutkan kompetisi produk kudapan berbahan dasar daun kelor.

Zulfahnur berharap kegiatan tersebut turut mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menurunkan angka stunting.

Sebagai bentuk dukungan, kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terkait Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Melalui gerakan tersebut, anggota DWP OPD Aceh Barat menyatakan kesediaannya berpartisipasi dalam mendukung upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui pengembangan bantuan telur bagi keluarga sasaran.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ANEKA BERITA

6 BERITA

INTERNASIONAL

Ukraina Tangkap WNI asal Jawa jadi Tawanan Perang, Ini Wajahnya Lihat!

Oleh Redaksi · 12 Nov, 18.46 WIB



Gambar ini menampilkan foto seorang pria Asia yang mengenakan kemeja bergaris dengan latar belakang biru cerah. Di sisi kiri gambar, terdapat teks tebal berwarna hitam yang menyatakan bahwa pria tersebut adalah tawanan perang pertama dari Indonesia di Ukraina.

BANDA ACEH - Ukraina menyatakan telah menangkap tawanan perang pertama asal Indonesia.

Penangkapan itu, menurut pemerintah Ukraina, terjadi di tengah peningkatan perekrutan WNI oleh Rusia untuk dijadikan tentara di garis depan pertempuran.

Pria berusia 49 tahun yang berasal dari Jawa Timur itu dibawa ke wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, untuk ikut serta militer Rusia dalam serangan ke Ukraina.

Menurut pemerintah Ukraina, gugus tempur pria tersebut diserang drone militer Ukraina sehingga mereka kocar-kacir. Dia sempat bergerak tak tentu arah selama beberapa hari, tapi kemudian ditangkap oleh pasukan Ukraina.

Berdasarkan data pemerintah Ukraina, pria itu merupakan salah satu 283 WNI yang direkrut militer Rusia selama Januari hingga September 2026 untuk bertempur melawan Ukraina.

Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan periode 2023-2025. Selama kurun waktu itu, jumlah WNI yang direkrut militer Rusia tidak pernah melebihi 10 orang.

Penangkapan pria itu dikonfirmasi juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang.

"Kemlu RI telah mendapatkan informasi terdapat penangkapan satu orang WNI dengan insial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut," ujar Yvonne dalam konferensi pers pada Rabu (11/11).

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik agar pemerintah Rusia menghentikan perekrutan WNI dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.

"Sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi dan kerja sama erat dengan pihak Rusia untuk mencegah kasus ini terulang lagi di kemudian hari," jelasnya.

Apa latar belakang pria berinisial AS?

Pria berinisial AS berasal dari Blitar, Jawa Timur.

Pada 27 Mei 2026, mantan teman sekolahnya yang berinisial AA, menawarinya pekerjaan konstruksi bangunan sipil di Rusia dengan sistem kontrak.

Adapun AA bertindak atas perintah seseorang bernama Alexander, yang merekrut orang-orang untuk dikirim ke Rusia. Alexander pula yang mengatur keberangkatan AS.

Pada 22 Juli, AS bersama seseorang berinisial CK terbang ke Moskow. Di sana mereka ditempatkan di sebuah apartemen bersama dua warga Rusia.

Setelah itu, AS menandatangani kontrak pekerjaan yang dia kira konstruksi berdurasi satu tahun.

Namun pada kenyataannya, kontrak tersebut mengharuskan AS bekerja sebagai tentara untuk Kementerian Pertahanan Rusia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

Brutal! Pasukan Israel Bombardir Rumah Sakit di Gaza, 4 Orang Tewas

Oleh Redaksi · 12 Nov, 08.10 WIB



Gambar ini menunjukkan dua kolom asap abu-abu besar yang naik ke langit dari lanskap yang dipenuhi reruntuhan bangunan di Gaza, Palestina. Puing-puing berserakan di seluruh area,

GAZA - Pasukan Israel melancarkan serangan terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, Kamis (12/11/2026) dini hari. Serangan brutal tersebut menewaskan sedikitnya empat orang.

Juru Bicara Pertahanan Sipil Gaza Mahmoud Basal mengatakan, serangan tersebut menghantam lantai dua gedung Al Yasin yang berada di dalam Kompleks Rumah Sakit Nasser.

Direktur rumah sakit mengatakan serangan itu menyebabkan kerusakan parah pada bangsal perawatan intensif dan ruang bedah.

Pasukan Zionis mengintensifkan serangan ke Gaza dalam beberapa hari terakhir. Pada Rabu kemarin, serangan Israel di Kota Gaza dan kamp pengungsi Bureij menewaskan lima orang dan melukai beberapa lainnya.

Sehari sebelumnya, serangan juga menewaskan seorang warga.

Serangan-serangan ini terjadi di tengah pelanggaran berkelanjutan oleh Israel terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025.

Sejak itu Israel telah membunuh 1.622 warga Gaza dan melukai 5.878 orang lainnya.

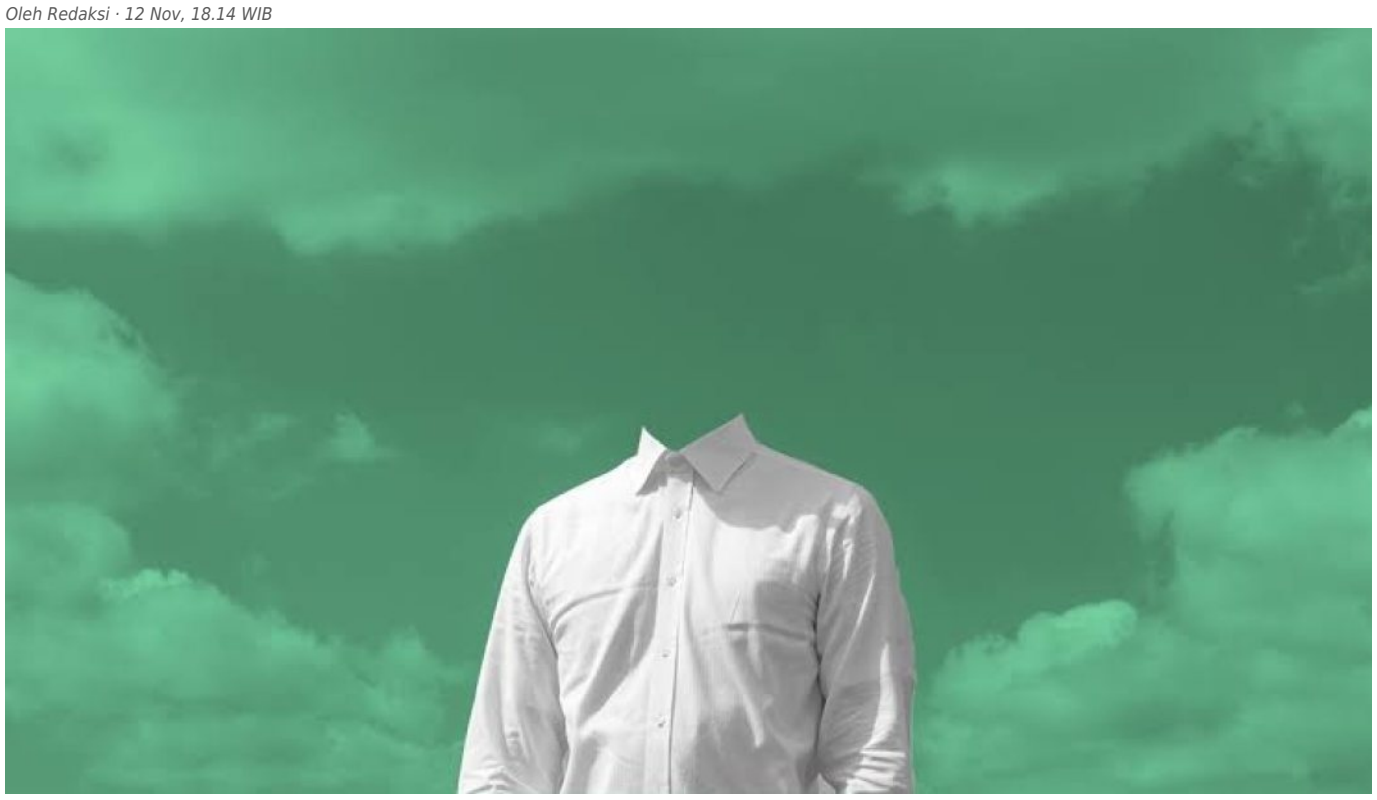
Sejak Oktober 2023, perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 74.600 orang dan melukai hampir 176.000 lainnya, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu serangan juga menghancurkan 90 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut.

ISLAM

Dalam Islam, Pemimpin yang Tak Lagi Kompeten Wajib Mundur? Ini Penjelasan Ulama

Oleh Redaksi · 12 Nov, 18.14 WIB



Pengunduran diri seorang pejabat sering kali dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan dalam mempertahankan kekuasaan. Padahal, dalam perspektif Islam, keputusan mundur dari jabatan justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab dan kesadaran terhadap amanah yang diemban.Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kehormatan yang harus dipertahankan. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kemampuan, keadilan, dan tanggung jawab.

Karena itu, seorang pemimpin tidak sepatutnya mempertahankan kekuasaan apabila sudah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, dalam kondisi tertentu, melepas jabatan menjadi kewajiban demi mencegah kerusakan yang lebih besar.

Abu Bakar Al-Khawarizmi dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum menjelaskan bahwa pengunduran diri seorang pejabat diperbolehkan apabila terdapat kondisi yang menghambat kemampuannya dalam menjalankan kepemimpinan, misalnya sakit yang berdampak pada produktivitas dan kinerjanya. Terlebih apabila terdapat sosok lain yang lebih mampu untuk mengisi posisi tersebut.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan seorang pemimpin untuk mempertahankan jabatan secara membabi buta. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Pemimpin Tidak Kompeten Wajib Melepas Jabatan

Dalam kehidupan sosial, pengunduran diri seorang pejabat terkadang dipandang sebagai bentuk kekalahan, kelemahan, bahkan kehinaan. Padahal, keputusan tersebut bisa menjadi bukti kedewasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin.

Setiap bidang pekerjaan membutuhkan kompetensi yang sesuai. Seorang pebisnis harus memiliki kemampuan dalam mengelola usaha. Begitu pula seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas dan kecakapan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Ketika seorang pejabat tidak lagi memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin, mempertahankan jabatan justru berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Pandangan ini ditegaskan oleh Imam Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi. Ia menjelaskan:

وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِذَا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ نَقْصًا يُؤَثِّرُ فِي الْإِمَامَةِ

Artinya:

“Wajib bagi seorang pemimpin melepas jabatannya ketika ia mendapati kekurangan pada dirinya yang berpengaruh terhadap kepemimpinannya.” (Tafsir Al-Qurthubi, Kairo, Dar Mishriyah, 1964, Juz I, halaman 272).

Penjelasan tersebut memberikan pesan bahwa jabatan bukan hak yang dapat dipertahankan tanpa mempertimbangkan kemampuan diri.

Seorang pemimpin harus mampu mengevaluasi apakah dirinya masih layak menjalankan amanah atau justru menjadi penghambat bagi kepentingan masyarakat.

Ketidakmampuan seorang pejabat dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, kondisi kesehatan yang semakin menurun, gangguan kemampuan berpikir, hingga ketidakmampuan mengambil keputusan secara tepat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Gibran Rakabuming Raka Masuk Nominasi Pria Terganteng di Dunia 2026 versi Special Awards

Oleh Redaksi · 12 Nov, 11.17 WIB



BANDA ACEH - Kabar tak biasa datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namanya mendadak masuk dalam daftar nominasi pria terganteng di dunia 2026 versi Special Awards. Kabar tersebut sontak menarik perhatian karena Gibran bersanding dengan sejumlah nama pesohor dunia, termasuk personel grup K-Pop.

Pengumuman nominasi itu disampaikan melalui akun Instagram @special.awards pada Kamis (12/11/2026). Dalam unggahannya, akun tersebut mengumumkan daftar kandidat untuk kategori 100 Most Handsome Beautiful of the Years 2026.

Nama Gibran tercantum sebagai salah satu nominasi dalam kategori Most Handsome. Namun, ada hal menarik dari penulisan nama putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut. Akun Special Awards menuliskan namanya sebagai 'Gibran Rakha Buming Rakha'.

Dalam daftar yang sama, Gibran harus bersanding dengan sejumlah figur populer dari industri hiburan internasional. Beberapa nama yang turut masuk nominasi di antaranya aktor Thailand Boom Tharatorn, personel BTS Jungkook, hingga Wooyoung dari ATEEZ.

Special Awards juga membuka mekanisme pemungutan suara bagi para pendukung kandidat. Berdasarkan keterangan dalam unggahan tersebut, pengumpulan poin dilakukan melalui aktivitas menyukai, berkomentar, dan membagikan postingan di media sosial.

Setiap satu tanda suka bernilai lima poin, satu komentar bernilai dua poin, sedangkan satu kali membagikan unggahan bernilai 10 poin. Pendukung juga diminta mengikuti akun Instagram @100_thebestface dan @special.awards.

Menariknya, jumlah interaksi pada foto Gibran mulai terlihat. Hingga berita ini dibuat, unggahan nominasi Gibran telah mengumpulkan 1.388 tanda suka dan 78 komentar.

Meski demikian, masuknya Gibran dalam daftar tersebut merupakan nominasi yang diumumkan oleh akun Special Awards. Belum ada keterangan mengenai proses seleksi maupun lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap para kandidat.

Kehadiran nama Gibran Rakabuming Raka di antara deretan aktor dan idol K-Pop ini pun menjadi hal yang tak biasa. Publik kini bisa melihat bagaimana perolehan dukungan untuk Wakil Presiden RI tersebut dalam pemungutan suara yang digelar Special Awards

EKONOMI

Dua Tahun Menjabat Wapres, Harta Kekayaan Gibran Naik Rp2,33 Miliar

Oleh Redaksi · 12 Nov, 13.16 WIB



Gibran Rakabuming Raka terlihat sedang berjalan di area terbuka yang dijaga ketat oleh petugas keamanan.

BANDA ACEH - Resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp27.915.654.176 (Rp27,91 miliar) berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Berdasarkan penelusuran RMOL yang dikutip HARIANAEH.co.id. Di laman e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 12 November 2026, laporan tersebut disampaikan pada 23 Maret 2026 dan berstatus verifikasi administratif lengkap.

Dalam laporan itu, jabatan Gibran tercatat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Angka tersebut meningkat dibandingkan laporan periodik 2024 yang mencatat kekayaan Gibran sebesar Rp27.519.975.620 (Rp27,51 miliar).

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp395.678.556 atau sekitar Rp395,67 juta dalam setahun.

Jika dibandingkan dengan laporan periodik 2020, harta kekayaan Gibran mengalami kenaikan sekitar Rp6,76 miliar.

Saat itu, total kekayaannya tercatat sebesar Rp21.152.810.130 (Rp21,15 miliar).

Dalam data e-LHKPN, kekayaan Gibran tercatat sebesar Rp25.297.783.659 (Rp25,29 miliar) pada 2021, kemudian naik menjadi Rp26.032.674.370 (Rp26,03 miliar) pada 2022.

Pada 2023, laporan periodiknya mencatat Rp25.576.015.455 (Rp25,57 miliar).

Sementara laporan khusus calon Wakil Presiden yang disampaikan pada 24 Oktober 2023 mencatat Rp25.545.215.362 (Rp25,54 miliar).

Selanjutnya, pada 2024 total kekayaan Gibran tercatat Rp27.519.975.620 (Rp27,51 miliar) hingga meningkat menjadi Rp27.915.654.176 (Rp27,91 miliar) pada laporan periodik 2025.

Dalam laporan periodik 2025, harta Gibran paling besar berupa tanah dan bangunan senilai Rp17,44 miliar.

Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 500/300 meter persegi di Surakarta senilai Rp6 miliar.

Kemudian ada dua bidang tanah dan bangunan masing-masing seluas 2.000/2.000 meter persegi di Sragen, dengan nilai masing-masing Rp2,6 miliar.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 112/112 meter persegi di Surakarta senilai Rp1,5 miliar.

Ada pula tanah seluas 113 meter persegi di Surakarta senilai Rp700 juta, tanah seluas 896 meter persegi senilai Rp1,792 miliar, serta tanah seluas 1.124 meter persegi senilai Rp2,248 miliar.

Untuk alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan kekayaan sebesar Rp286,5 juta.

Aset tersebut terdiri dari sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 senilai Rp6,5 juta, Honda CB-125 tahun 1974 senilai Rp5 juta, serta Royal Enfield tahun 2017 senilai Rp40 juta.

Kemudian mobil Toyota Avanza tahun 2016 senilai Rp75 juta, Toyota Avanza tahun 2012 senilai Rp50 juta, Isuzu Panther tahun 2012 senilai Rp55 juta, dan Daihatsu Grand Max tahun 2015 senilai Rp55 juta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

HMI Sumut: MBG mengandung Unsur Babi, Kelalaian Tidak Bisa Ditoleransi

Oleh Ria Nurvika · 12 Nov, 06.40 WIB



Ilustrasi proses pemeriksaan dan pengawasan kualitas serta kehalalan makanan di lingkungan sekolah. Pengawasan ketat terhadap rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tuntutan utama menyusul adanya dugaan temuan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. FOTO/Dok. Ilustrasi.

ROGRAM pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga hari ini terus menuai masalah.

Kali ini muncul dugaan bahan makanan yang digunakan dalam penyediaan menu MBG oleh SPPG yang dikaitkan dengan Yayasan Tali geni Indonesia di wilayah Medan Denai dan Medan Tenggara, Kota Medan.

Hal ini mendapatkan kecaman dari Himpunan Mahasiswa Isalam (HMI) Sumatera Utara melalui Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution.

Ia menyampaikan bahwa ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kesalahan teknis biasa.

Persoalan ini menyangkut perlindungan penerima manfaat, kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal, serta tanggung jawab pengawasan dalam penyelenggaraan program pemerintah.

HMI Sumut menuntut persoalan ini diperiksa secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Pada Pasal 6 huruf e ditegaskan bahwa penjaminan produk halal bagi kelompok yang dipersyaratkan sebagai bagian dari pelaksanaan MBG serta Pasal 15 ayat (1) ditetapkan bahwa Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) bertugas untuk mengawasi dan mengoordinasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, Pasal 23 dan 24 dalam peraturan tersebut diatur mengenai penjaminan serta pengawasan keamanan dan mutu pangan pada setiap rantai pasok penyelenggaraan MBG.

Adapun Pasal 28 secara khusus mengatur penerapan standar kehalalan produk bagi kelompok sasaran yang dipersyaratkan.

Selain Peraturan Presiden, Undang-Undang telah menjamin Produk Halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Regulasi tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang dipersyaratkan, sekaligus ketentuan mengenai produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal.

Undang-Undang ini memberikan tugas kepada Badan penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Apabila terdapat pelanggaran maka dapat dikenakan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jangan sampai persoalan ini selesai hanya melalui klarifikasi dan permintaan maaf.

Penjaminan halal bagi produk di negara yang mayoritas muslim ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara melalui pengawasan yang ketat.

Persoalan adanya bahan yang tidak halal di dalam MBG yang merupakan program andalan pemerintah hari ini menunjukkan kurangnya pengawasan pemerintah bahkan untuk program yang dirancang oleh pemerintah sendiri pun ternyata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin